



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 97 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 89 TAHUN 2016
TENTANG KODE REKENING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:** a. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan negara, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (APBD-P) Tahun Anggaran 2017 maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa lampiran dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut :

1. Lampiran VI diubah sehingga keseluruhan Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran V diubah sehingga keseluruhan Lampiran V berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

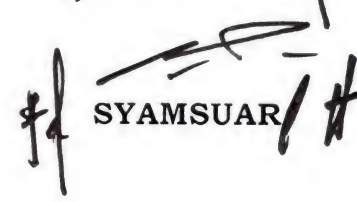
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 September 2017

 **BUPATI SIAK**

 **SYAMSUAR**

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

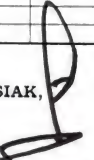

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004


BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 97

**KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI
 KABUPATEN SIAK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KODE	URUSAN ORGANISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
101	Pendidikan	1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
102	Kesehatan	1.02.01	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.01	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	
105	Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	
106	Sosial	1.06.01	Dinas Sosial	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
201	Tenaga Kerja	2.01.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
202	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
203	Pangan	2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	
204	Pertanahan	2.04.01	Urusan Pertanahan (Sekretariat Daerah)	
205	Lingkungan Hidup	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	
206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
207	Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.08.01	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	
209	Perhubungan	2.09.01	Dinas Perhubungan	
210	Komunikasi dan Informatika	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	
211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
212	Penanaman Modal	2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
213	Kepemudaan dan Olah Raga	2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
214	Statistik	2.14.01	Urusan Statistik (Dinas Komunikasi dan Informatika)	
215	Persandian	2.15.01	Urusan Persandian (Dinas Komunikasi dan Informatika)	
216	Kebudayaan	2.16.01	Urusan Kebudayaan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	
217	Perpustakaan	2.17.01	Dinas Perpustakaan	
218	Kearsipan	2.18.01	Urusan Kearsipan (Dinas Perpustakaan)	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
301	Kelautan dan Perikanan	3.01.01	Dinas Perikanan dan Peternakan	
302	Pariwisata	3.02.01	Dinas Pariwisata	
303	Pertanian	3.03.01	Dinas Pertanian	
		3.03.02	Urusan Pertanian (Dinas Perikanan dan Peternakan)	
304	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.04.01	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)	
305	Perdagangan	3.05.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
306	Perindustrian	3.06.01	Urusan Perindustrian (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	
307	Transmigrasi	3.07.01	Urusan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)	
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	
401	Perencanaan	4.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
402	Keuangan	4.02.01	Badan Keuangan Daerah	
403	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	4.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
404	Penelitian dan Pengembangan	4.04.01	Urusan Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)	
405	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.05.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
406	Kesatuan Bangsa dan Politik	4.06.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	FUNGSI PENDUKUNG	5	FUNGSI PENDUKUNG	
501	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	5.01.01	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	
502	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.02.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
503	Sekretariat Daerah	5.03.01	Sekretariat Daerah	
504	Sekretariat DPRD	5.04.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
505	Inspektorat	5.05.01	Inspektorat	
506	Sekretariat KORPRI	5.06.01	Sekretariat KORPRI	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KODE	URUSAN ORGANISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
507	Kecamatan	5.07.01	Kecamatan Siak	
		5.07.02	Kecamatan Sungai Apit	
		5.07.03	Kecamatan Minas	
		5.07.04	Kecamatan Tualang	
		5.07.05	Kecamatan Dayun	
		5.07.06	Kecamatan Kerinci Kanan	
		5.07.07	Kecamatan Bunga Raya	
		5.07.08	Kecamatan Sungai Mandau	
		5.07.09	Kecamatan Kandi	
		5.07.10	Kecamatan Koto Gasib	
		5.07.11	Kecamatan Lubuk Dalam	
		5.07.12	Kecamatan Sabak Auh	
		5.07.13	Kecamatan Mempura	
		5.07.14	Kecamatan Pusako	

h BUPATI SIAK, 

71 SYAMSUAR 

**SUSUNAN KODE AKUN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	2
1	Aset	
2	Kewajiban	
3	Ekuitas Dana	
4	Pendapatan	
5	Belanja	
6	Pembiayaan	

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

KODE DAN KLASIFIKASI FUNGSI
KABUPATEN SIAK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
01	Pelayanan Umum	
02	Pertanahan *)	
03	Ketertiban dan Ketentraman	
04	Ekonomi	
05	Lingkungan Hidup	
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	
07	Kesehatan	
08	Pariwisata dan Budaya	
09	Agama *)	
10	Pendidikan	
11	Perlindungan Sosial	

Keterangan :
*) Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah

BUPATI SIAK,
SYAMSUAR

**KODE DAN DAFTAR PROGRAM KEGIATAN
 MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SIAK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		
			PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD	
X XX	XX	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
X XX	XX	01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	
X XX	XX	01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	
X XX	XX	01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	
X XX	XX	01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	
X XX	XX	01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	
X XX	XX	01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
X XX	XX	01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	
X XX	XX	01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	
X XX	XX	01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
X XX	XX	01.10	Penyediaan alat tulis kantor	
X XX	XX	01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
X XX	XX	01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
X XX	XX	01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
X XX	XX	01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	
X XX	XX	01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
X XX	XX	01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	
X XX	XX	01.17	Penyediaan makanan dan minuman	
X XX	XX	01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
X XX	XX	01.19	Penyediaan jasa keamanan kantor	
X XX	XX	01.20	Penyediaan jasa administrasi kantor	
X XX	XX	01.21	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	
X XX	XX	01.22	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	
X XX	XX	01.23	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	
X XX	XX	01.24	Penyediaan jasa administrasi kantor teknis pertanahan	
X XX	XX	01.25	Penataan dan Pengelolaan Arsip Satuan Kerja Perangkat Daerah	
X XX	XX	01.26	Penyelenggaraan pelayanan UPTD Labkesda Kabupaten Siak	
X XX	XX	01.27	Penyelenggaraan pelayanan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Siak	
X XX	XX	01.28	Penyelenggaraan Pelayanan Instalasi Pemerintah Wajib Laport	
X XX	XX	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
X XX	XX	02.01	Pembangunan rumah jabatan	
X XX	XX	02.02	Pembangunan rumah dinas	
X XX	XX	02.03	Pembangunan gedung kantor	
X XX	XX	02.04	Pengadaan mobil jabatan	
X XX	XX	02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	
X XX	XX	02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	
X XX	XX	02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	
X XX	XX	02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	
X XX	XX	02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	
X XX	XX	02.10	Pengadaan mebeleur	
X XX	XX	02.11	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	
X XX	XX	02.12	Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi	
X XX	XX	02.13	Pengadaan peralatan pembangkit listrik dan kelengkapannya	
X XX	XX	02.14	Pengadaan instalasi udara	
X XX	XX	02.15	Pengadaan Sarana Publikasi	
X XX	XX	02.16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan	
X XX	XX	02.17	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	
X XX	XX	02.18	Pengadaan peralatan Satuan Pemadam Kebakaran	
X XX	XX	02.19	Pengadaan Peralatan Satuan Pengamanan	
X XX	XX	02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	
X XX	XX	02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	
X XX	XX	02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
X XX	XX	02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	
X XX	XX	02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
X XX	XX	02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	
X XX	XX	02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	
X XX	XX	02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	
X XX	XX	02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	
X XX	XX	02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	
X XX	XX	02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	
X XX	XX	02.31	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi	
X XX	XX	02.32	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	
X XX	XX	02.33	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	
X XX	XX	02.34	Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor	
X XX	XX	02.35	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan khusus lapangan	
X XX	XX	02.36	Pemeliharaan rutin/berkala sound system	
X XX	XX	02.37	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan air minum	
X XX	XX	02.38	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik	
X XX	XX	02.39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	
X XX	XX	02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	
X XX	XX	02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	
X XX	XX	02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	
X XX	XX	02.43	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	
X XX	XX	02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1			2	3
X XX	XX	02.45	Pembangunan Gedung Kantor Kepala Desa	
X XX	XX	02.46	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	
X XX	XX	02.47	Penyusunan DED	
X XX	XX	02.48	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Gedung Peninggalan Bersejarah	
X XX	XX	02.49	Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Istana Sultan Siak	
X XX	XX	02.50	Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Masjid Bersejarah	
X XX	XX	02.51	Pembangunan Gedung / Gudang Barang	
X XX	XX	02.52	Pembangunan Gedung Pertemuan Serba Guna Pemerintah Kabupaten Siak	
X XX	XX	02.53	Fasilitasi Penyusunan LPPD Kab.Siak	
X XX	XX	02.54	Pengadaan kendaraan Khusus / Lainnya	
X XX	XX	02.55	Pembuatan Pagar Workshop	
X XX	XX	02.56	Pengadaan Sarana dan Prasarana E-KTP	
X XX	XX	02.57	DED (Detail Engineering Design) Gedung Kantor Desa	
X XX	XX	02.58	Penyusunan DED Rumah Dinas Jabatan Camat Siak	
X XX	XX	02.59	Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (SIPATEN)	
X XX	XX	02.60	Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten Siak	
X XX	XX	02.61	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sekolah Keagamaan	
X XX	XX	02.62	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan	
X XX	XX	02.63	Penyusunan DED Fasilitas Perkantoran	
X XX	XX	02.64	Perencanaan Teknis Semenisasi Kab. Siak	
X XX	XX	02.65	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Lanscape	
X XX	XX	02.66	Pembangunan Gedung Kesenian Kab. Siak	
X XX	XX	02.67	Pengembangan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Siak	
X XX	XX	02.68	Bimbingan Teknis Analisa Jabatan, ABK dan Evaluasi Jabatan	
X XX	XX	02.69	Pembangunan Sekolah Keagamaan	
X XX	XX	02.70	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan	
X XX	XX	02.71	Pembangunan Pasar Seni	
X XX	XX	02.72	DED (Detail Engenering Design) Pembangunan Gedung/Ruang	
X XX	XX	02.73	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	
X XX	XX	02.74	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	
X XX	XX	02.75	Pembangunan Gedung Serba Guna di Wilayah Kecamatan	
X XX	XX	02.76	Pembangunan Gedung Kantor Koramil	
X XX	XX	02.77	Pembangunan Rumah Dinas di Wilayah Kecamatan	
X XX	XX	02.78	Rehab Gedung Kantor KUA	
X XX	XX	02.79	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Minas	
X XX	XX	02.80	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Dayun	
X XX	XX	02.81	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Kandis	
X XX	XX	02.82	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Pusako	
X XX	XX	02.83	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Siak	
X XX	XX	02.84	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Tualang	
X XX	XX	02.86	Pembangunan Gedung Diklat BKD	
X XX	XX	02.87	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
X XX	XX	02.88	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Kesehatan Daerah	
X XX	XX	02.89	Pembangunan Lanscape dan Pagar Instalasi Farmasi Kabupaten	
X XX	XX	02.90	Pekerjaan Interior Kantor	
X XX	XX	02.91	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Publikasi	
X XX	XX	02.92	Pembangunan Gedung Kwartab Pramuka	
X XX	XX	02.93	Pembangunan Gedung Kesenian Kab. Siak	
X XX	XX	02.94	Land Clearing Lahan Pemerintah Kab. Siak	
X XX	XX	02.95	Pembangunan Sarana Perkantoran Pemerintah Daerah	
X XX	XX	02.96	Pemeliharaan rutin/berkala dalam dan luar istana siak	
X XX	XX	02.97	Pemeliharaan rutin/berkala dalam dan luar masjid bersejarah	
X XX	XX	02.98	Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	
X XX	XX	02.99	Timbunan di Wilayah Kecamatan	
X XX	XX	02.100	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor Mapolres Kab. Siak	
X XX	XX	02.101	Pembangunan Kantor Lurah	
X XX	XX	02.102	Penyusunan Dokumen AMDAL Makodim Kabupaten Siak	
X XX	XX	02.103	Pengembangan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Siak	
X XX	XX	02.104	Pembangunan Gedung Arsip	
X XX	XX	02.105	Landscape Balairung (Pendopo) Perumahan Jabatan	
X XX	XX	02.106	Pembangunan Air Mancur Kawasan Lapangan Maharatu Center	
X XX	XX	02.107	Pembangunan Tempat Parkir, Taman (lanscape) Pengembangan Eks. Gedung Balai Tenun	
X XX	XX	02.108	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	
X XX	XX	02.109	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Dinas Jabatan Bupati Siak	
X XX	XX	02.110	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana PLTD pemda Kab.Siak	
X XX	XX	02.111	Pemeliharaan/relokasi dan optimalisasi jaringan listrik dan kelengkapannya di Kab. Siak	
X XX	XX	02.112	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Siak Televisi (Siak TV)	
X XX	XX	02.113	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Siak	
X XX	XX	02.114	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi TV Relay Swasta Nasional Siak	
X XX	XX	02.115	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi Siak TV	
X XX	XX	02.116	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	
X XX	XX	02.117	Penyusunan UKL/UPL	
X XX	XX	02.118	Pembangunan Lapangan Upacara Kantor Camat Sungai Apit	
X XX	XX	02.119	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Tualang	
X XX	XX	02.120	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Kerinci Kanan	
X XX	XX	02.121	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Siak	
X XX	XX	03	Program peningkatan disiplin aparatur	
X XX	XX	03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	
X XX	XX	03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	
X XX	XX	03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	
X XX	XX	03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	
X XX	XX	03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	
X XX	XX	03.06	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	
X XX	XX	03.07	Penyediaan jasa kesehatan jasmani/rohani pegawai	
X XX	XX	03.08	Penyediaan Logistik Rumah Tangga Jabatan	

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1			2	3
X XX	XX	03.09	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	
X XX	XX	03.10	Penyelenggaraan SKJ Pegawai di Lingkungan Kab. Siak	
X XX	XX	03.11	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	
X XX	XX	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
X XX	XX	05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	
X XX	XX	05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	
X XX	XX	05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
X XX	XX	05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	
X XX	XX	05.05	Kegiatan penelitian mandiri (Fungsional)	
X XX	XX	05.06	Bimbingan teknis dan Diklat teknis fungsional aparatur SKPD	
X XX	XX	05.07	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	
X XX	XX	05.08	Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas	
X XX	XX	05.09	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas	
X XX	XX	05.10	Bimbingan Teknis Analisis Jabatan	
X XX	XX	05.11	Pelatihan Pelayanan Terpadu bagi Kecamatan Se-Kab. Siak	
X XX	XX	05.12	Pelatihan Pemberdayaan Aparatur Kecamatan	
X XX	XX	05.13	Pembelajaran langsung pelayanan perizinan Kota Yogyakarta	
X XX	XX	05.14	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas	
X XX	XX	05.15	Konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi peraturan-peraturan dibidang pendidikan	
X XX	XX	05.16	Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan	
X XX	XX	05.17	Bimbingan teknis dan diklat teknis kearsipan	
X XX	XX	05.18	Sosialisasi / penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah kabupaten siak	
X XX	XX	05.19	Bimbingan teknis dan diklat teknis perpustakaan	
X XX	XX	05.20	Pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan	
X XX	XX	05.21	Bimbingan teknis pembekalan panitia rencana aksi nasional hak asasi manusia (HAM) Kabupaten Siak	
X XX	XX	05.22	Bimbingan teknis penanganan perkara perdata dan tata usaha negara (TUN)	
X XX	XX	05.23	Bimbingan teknis penyusunan dan perancangan MoU dan surat perjanjian	
X XX	XX	05.24	Bimbingan teknis penegakan Peraturan Daerah bagi Satpol PP Kabupaten Siak	
X XX	XX	05.25	Bimbingan teknis penegakan peraturan perundang-undangan bagi PPNS Kabupaten Siak	
X XX	XX	05.26	Bimbingan teknis sistem informasi hukum (Siskum) peraturan perundang - undangan	
X XX	XX	05.27	Bimbingan teknis pembekalan bagi aparatur pemerintah tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	
X XX	XX	05.28	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa	
X XX	XX	05.29	Bimbingan teknis pelayanan publik	
X XX	XX	05.30	Penyusunan analisa beban kerja	
X XX	XX	05.31	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah	
X XX	XX	05.32	Sosialisasi standar pelayanan minimal	
X XX	XX	05.33	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi SKPD	
X XX	XX	05.34	Pelatihan dan Pendidikan Data Base dan Implementasi Paten bagi Aparatur Kecamatan	
X XX	XX	05.35	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Kehutanan.	
X XX	XX	05.36	Bimbingan Manajemen Mutu ISO 9001:2008	
X XX	XX	05.37	Pelatihan/Training Pembentukan Karakter dan Budaya Kerja	
X XX	XX	05.38	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah	
X XX	XX	05.39	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)	
X XX	XX	05.40	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM III)	
X XX	XX	05.41	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	
X XX	XX	05.42	Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Publik dalam bidang kependudukan	
X XX	XX	05.43	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Tentang Pelayanan dan Pencatatan Sipil	
X XX	XX	05.44	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik tentang Peristiwa Kelahiran dan Pencatatan Sipil	
X XX	XX	05.45	Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kapasitas Perangkat Daerah dalam rangka Reformasi Birokrasi	
X XX	XX	05.46	Sosialisasi revisi PP 41 tahun 2007 bagi perangkat daerah	
X XX	XX	05.47	Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
X XX	XX	05.48	Bimbingan teknis penilaian kinerja individu pegawai	
X XX	XX	05.49	Bimbingan Teknis Strategi Pelayanan Prima	
X XX	XX	05.50	Hari Ulang Tahun (HUT Satpol dan Linmas)	
X XX	XX	05.51	Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan	
X XX	XX	05.52	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	
X XX	XX	05.53	Bimbingan Teknis Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman	
X XX	XX	05.54	Bimbingan Teknis Aparatur Pertanian	
X XX	XX	05.55	Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian	
X XX	XX	05.56	Bimbingan Teknis Penerapan Teknologi Pertanian	
X XX	XX	05.57	Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Pertanian	
X XX	XX	05.58	Pengembangan Sumber Daya Pertanian	
X XX	XX	05.59	Pelatihan tentang Pengendalian Penyakit	
X XX	XX	05.60	Pelatihan Petugas Promosi dan Kesehatan Keluarga	
X XX	XX	05.61	Pelatihan Petugas Pelayanan Kesehatan	
X XX	XX	05.62	Pelatihan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	
X XX	XX	05.63	Reward Petugas Pelayanan	
X XX	XX	05.64	Pembinaan Kepada Lembaga Pelayanan Publik	
X XX	XX	05.65	Pelatihan dan pendidikan aparatur kecamatan	
X XX	XX	05.66	Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas Elektronik	
X XX	XX	05.67	Sosialisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi	
X XX	XX	05.68	Sosialisasi Undang-undang ASN	
X XX	XX	05.69	Bimbingan Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP)	
X XX	XX	05.70	Bimbingan Teknis Penyusunan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	
X XX	XX	05.71	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengelolaan Kegiatan untuk Tingkat Dasar	
X XX	XX	05.72	Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa	
X XX	XX	05.73	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	
X XX	XX	05.74	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	
X XX	XX	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
X XX	XX	06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
X XX	XX	06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	
X XX	XX	06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1			2	3
X XX	XX	06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	
X XX	XX	06.05	Penyusunan Laporan LAKIP	
X XX	XX	06.06	Penyusunan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi	
X XX	XX	06.07	Penyusunan Renstra	
X XX	XX	06.08	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
X XX	XX	06.09	Monitoring dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
X XX	XX	06.10	Penyusunan pelaporan penagihan piutang daerah	
X XX	XX	06.11	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	
X XX	XX	06.12	Penyusunan laporan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	
X XX	XX	06.13	Fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
101			Pendidikan	
101	XX	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
101	XX	15.01	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	
101	XX	15.02	Pembangunan Gedung Sekolah	
101	XX	16	Program Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	
101	XX	16.01	Pengembangan pendidikan anak usia dini	
101	XX	16.02	Pembinaan Paud Terpadu Pembina Holistik integratif	
101	XX	17	Program Pendidikan Masyarakat	
101	XX	17.01	Penyelenggaraan Paket A setara SD	
101	XX	17.02	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	
101	XX	17.03	Penyelenggaraan Paket C setara SMA	
101	XX	18	Program Pendidikan Dasar	
101	XX	18.01	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Sekolah Dasar	
101	XX	18.02	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Sekolah Menengah Pertama	
101	XX	18.03	Pengadaan mebeulair Sekolah Dasar (SD Sederajat)	
101	XX	18.04	Pengadaan mebeulair Sekolah Menengah Pertama (SMP Sederajat)	
101	XX	18.05	Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar (SD Sederajat)	
101	XX	18.06	Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP Sederajat)	
101	XX	18.07	Peningkatan sarana prasarana pendidikan Sekolah Dasar (SD sederajat)	
101	XX	18.08	Peningkatan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP sederajat)	
101	XX	18.09	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	PENAMBAHAN
101	XX	18.10	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	PENAMBAHAN
101	XX	18.11	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	PENAMBAHAN
101	XX	19	Program Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Dasar	
101	XX	19.01	Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SD/MI, dan Pemantauan UASBN SD/MI	
101	XX	19.02	Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SMP/MTs, dan Pemantauan UN/US SMP/MTs	
101	XX	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
101	XX	20.01	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) bagi Guru SD/MI	
101	XX	20.02	Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bagi Guru SMP/MTs	
101	XX	20.03	Peningkatan Kompetensi pendidik PAUD melalui pelatihan tingkat dasar (biaya pendidik kelas)	
101	XX	20.04	Diklat Calon Pengawas (Cawas)	
101	XX	20.05	Pelatihan Penilaian Kinerja Guru	
101	XX	20.06	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik pendidikan inklusif	
101	XX	20.07	Dukungan kesejahteraan Tenaga Kependidikan	
101	XX	20.08	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	
101	XX	20.09	Penilaian Angka Kredit Guru	
101	XX	21	Program Manajemen Layanan Pendidikan	
101	XX	21.01	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	
101	XX	21.02	Updating Profil Pendidikan dan Kebudayaan	
101	XX	21.03	Dukungan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Siak	
101	XX	23	Program Pendidikan Karakter	
101	XX	23.01	Pembinaan pendidikan karakter	
101	XX	24	Program Pendidikan Menengah	PENAMBAHAN
101	XX	24.01	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	PENAMBAHAN
101	XX	24.02	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	PENAMBAHAN
101	XX	24.03	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA Sederajat)	PENAMBAHAN
101	XX	25	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi	PENAMBAHAN
101	XX	25.01	Pembangunan Perguruan Tinggi (PT)	PENAMBAHAN
102			Kesehatan	
102	XX	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
102	XX	15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	
102	XX	15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	
102	XX	15.03	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	
102	XX	16	Program Pembinaan upaya kesehatan	
102	XX	16.01	Peningkatan pelayanan kesehatan gigi masyarakat	
102	XX	16.02	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	
102	XX	16.03	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes	
102	XX	16.04	Peningkatan pelayanan kesehatan kesehatan Rveral Sistem	
102	XX	16.05	Pelayanan kesehatan pada event-event resmi dan hari-hari besar	
102	XX	16.06	Penyelenggaraan Lokakarya Mini Puskesmas	
102	XX	16.07	Pelayanan dan pembinaan Fit for School	
102	XX	16.08	Pembinaan pelayanan kesehatan Batra	
102	XX	16.09	Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan	

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3		
102	XX	16.10	Pembinaan upaya kesehatan kerja	
102	XX	16.11	Pembinaan Pelayanan kesehatan usia lanjut	
102	XX	16.12	Pembinaan pelayanan kesehatan jiwa	
102	XX	16.13	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Siak	
102	XX	16.14	Pendampingan dan penilaian akreditasi Puskesmas	
102	XX	16.15	Akreditasi Rumah Sakit	
102	XX	17	Program Pengawasan obat dan makanan	
102	XX	17.01	Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	
102	XX	18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
102	XX	18.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	
102	XX	18.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	
102	XX	19	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	
102	XX	19.01	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	
102	XX	19.02	Penanggulangan kurang energi protein (KEP); enemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang Vit. A dan kekurangan zat besi lainnya	
102	XX	19.03	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	
102	XX	19.04	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu, dan Reproduksi	
102	XX	19.05	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	
102	XX	19.06	Peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah	
102	XX	19.07	Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Siak	
102	XX	20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
102	XX	20.01	Penyehatan lingkungan	
102	XX	20.02	Pembinaan dan pengembangan Kabupaten Sehat	
102	XX	20.03	Pengawasan dan pengendalian sarana air minum	
102	XX	20.04	Pengawasan dan pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU)	
102	XX	20.05	Pengawasan dan pemeriksaan tempat pengolahan makanan dan minuman	
102	XX	21	Program Pengendalian Penyakit	
102	XX	21.01	Peningkatan Imunisasi	
102	XX	21.02	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	
102	XX	21.03	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	
102	XX	21.04	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
102	XX	21.05	Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji	
102	XX	21.06	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	
102	XX	21.07	Penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS	
102	XX	21.08	Pemberantasan penyakit Tuberkulosis (TB)	
102	XX	22	Program Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	
102	XX	22.01	Pembangunan Puskesmas	
102	XX	22.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	
102	XX	22.03	Rehabilitasi Puskesmas	
102	XX	22.04	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	PENAMBAHAN
102	XX	22.05	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	PENAMBAHAN
102	XX	22.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes	PENAMBAHAN
102	XX	22.08	Rehabilitasi Puskemas Pembantu	
102	XX	22.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes	
102	XX	23	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah	
102	XX	23.01	Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Jamkesda)	
102	XX	23.03	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan	
102	XX	23.04	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Minas	
102	XX	23.05	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sungai Mandau	
102	XX	23.06	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kandis	
102	XX	23.07	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Siak	
102	XX	23.08	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Mempura	
102	XX	23.09	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kerinci Kanan	
102	XX	23.10	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Perawang	
102	XX	23.11	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Tualang	
102	XX	23.12	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Dayun	
102	XX	23.13	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Lubuk Dalam	
102	XX	23.14	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Koto Gasib	
102	XX	23.15	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sungai Apit	
102	XX	23.16	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Bunga Raya	
102	XX	23.17	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sabak Auh	
102	XX	23.18	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Pusako	
102	XX	24	Program Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit	
102	XX	24.41	Penyusunan DED	
102	XX	24.42	Penyusunan UKL-UPL/Amdal	
102	XX	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
102	XX	26.01	Penyediaan Alat kesehatan Rumah Sakit	
102	XX	26.02	Peningkatan Sarana Rumah Sakit	
102	XX	26.03	Peningkatan Prasarana Rumah Sakit	
102	XX	26.04	Penyediaan Perbekalan Farmasi Rumah Sakit	
102	XX	27	Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
102	XX	27.01	Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	
102	XX	27.02	Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	
102	XX	27.03	Pemeliharaan Prasarana Rumah Sakit	

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1			2	3
102	XX	28	Program Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	
102	XX	28.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	
102	XX	29	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	PENAMBAHAN
102	XX	29.01	Pendampingan dan Penunjang Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	PENAMBAHAN
102	XX	30	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	
102	XX	30.01	Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	
103			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
103	XX	15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	
103	XX	15.51	PENINGKATAN JALAN KECAMATAN DAYUN (DAK)	
103	XX	15.52	PENINGKATAN JALAN KECAMATAN KOTO GASIB (DAK)	
103	XX	15.56	PENINGKATAN JALAN KECAMATAN KANDIS (DAK)	
103	XX	15.57	Peningkatan Jalan Kecamatan Mempura	PENAMBAHAN
103	XX	15.58	Peningkatan Jalan Kecamatan Sungai Apit	PENAMBAHAN
103	XX	15.59	Peningkatan Jalan Kecamatan Tualang	PENAMBAHAN
103	XX	15.60	Peningkatan Jalan Kecamatan Kandis	PENAMBAHAN
103	XX	15.61	Peningkatan Jalan Kecamatan Sungai Mandau	PENAMBAHAN
103	XX	15.62	Peningkatan Jalan Kecamatan Dayun	PENAMBAHAN
103	XX	15.63	Perencanaan Pembangunan Jembatan	PENAMBAHAN
103	XX	17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/ TALUD/ BRONJONG	
103	XX	17.01	PERENCANAAN TURAP/TALUD/BRONJONG	
103	XX	17.12	REHABILITASI/PEMELIHARAAN TURAP/TALUD/BRONJONG	
103	XX	17.13	Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Siak	PENAMBAHAN
103	XX	18	PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	
103	XX	18.31	Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Mempura	PENAMBAHAN
103	XX	18.32	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KAB. SIAK WILAYAH I	
103	XX	18.33	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KAB. SIAK WILAYAH II	
103	XX	18.34	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KAB. SIAK WILAYAH III	
103	XX	18.35	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KAB. SIAK WILAYAH IV	
103	XX	18.36	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KAB. SIAK WILAYAH V	
103	XX	21	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	
103	XX	21.01	PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU	
103	XX	23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	
103	XX	23.11	REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN BENGKEL ALAT-ALAT BERAT	
103	XX	24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI; RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	
103	XX	24.01	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI KECAMATAN SABAK AUH	
103	XX	24.15	OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN	
103	XX	24.16	PENINGKATAN JARINGAN PENGAIRAN DAERAH IRIGASI RAWA KECAMATAN SABAK AUH (DAK)	
103	XX	28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	
103	XX	28.22	NORMALISASI SALURAN/ SUNGAI KABUPATEN SIAK	
103	XX	28.23	PEMELIHARAAN RUTIN DRAINASE/SALURAN KABUPATEN SIAK	
103	XX	42	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	
103	XX	42.01	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	
103	XX	44	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
103	XX	44.01	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
103	XX	44.02	PENILAIAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
103	XX	45	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	
103	XX	45.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	
103	XX	45.02	PENYUSUNAN DOKUMEN RAKP DAN INVENTARISASI ASET PUSAKA	
103	XX	45.03	PENYUSUNAN RTBL KAWASAN PUSAKA PRIORITAS	
103	XX	47	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM	
103	XX	47.01	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA AIR MINUM	
103	XX	47.02	PENINGKATAN PELAYANAN AIR MINUM	
103	XX	47.03	PAMSIMAS KABUPATEN SIAK	
103	XX	47.04	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SPAM DAN JARINGAN KAB. SIAK (DAK)	
103	XX	47.05	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SPAM DAN JARINGAN KAB. SIAK	PENAMBAHAN
103	XX	48	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
103	XX	48.01	PEMBANGUNAN PRASARANA SANITASI	
103	XX	48.02	PENGADAAN SARANA SANITASI	
103	XX	48.03	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA AIR LIMBAH	
104			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
104	XX	15	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	
104	XX	15.01	OPERASIONAL PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
105			Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
105	XX	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
105	XX	15.07	Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
105	XX	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	
105	XX	16.07	Peringatan Hari Ulang Tahun Satpol-PP	
105	XX	16.08	Peringatan Jambore Satpol-PP	

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1			2	3
105	XX	16.09	Pengamanan Tempat-tempat Penting	
105	XX	16.10	Pengawasan Pejabat dan Orang-orang Penting	
105	XX	16.11	Operasi Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	
105	XX	16.12	Kerjasama Penegakan Hukum Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	
106			Sosial	
106	XX	15	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	
106	XX	15.01	Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) - Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Fakir Miskin	
106	XX	15.02	Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kelompok (KUBE-PKH) Keluarga Sangat Miskin	
106	XX	15.03	Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial	
106	XX	15.04	Pembentukan dan Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kecamatan	
106	XX	15.05	Peringatan Hari Pahlawan Nasional	
106	XX	15.06	Rapat-rapat koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial	
106	XX	15.07	Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin dan PMKS Lainnya	
106	XX	22	Program Rehabilitasi Sosial	
106	XX	22.01	Rehabilitasi Sosial Anak di Luar Panti	
106	XX	22.02	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Luar Panti	
106	XX	22.03	Rehabilitasi Sosial penyandang Disabilitas di Luar Panti	
106	XX	22.04	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Luar Panti	
106	XX	22.05	Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas	
106	XX	22.06	Rujukan Rehabilitasi Sosial ke Panti	
106	XX	24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
106	XX	24.01	Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS)	
106	XX	24.02	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	
106	XX	24.03	Peningkatan Kapasitas SDM Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
106	XX	24.04	Buffer Stock dan Penyelenggaraan Penyaluran Bansos	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
201			Tenaga Kerja	
201	XX	15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	
201	XX	15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	
201	XX	15.07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana prsarana BLK/ Workshop	
201	XX	16	Program Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja	
201	XX	16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	
201	XX	16.03	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	
201	XX	17	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
201	XX	17.02	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
201	XX	17.03	Pelaksanaan dan Penguatan Fungsi LKS Tripartit Kabupaten Siak	
201	XX	17.17	Penyusunan dan Penerapan Sistem Pengupahan Untuk Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Siak	
201	XX	17.19	Pembinaan supervisi hubungan industrial	
201	XX	17.22	Monitoring dan Evlauasi	
202			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
202	XX	15	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
202	XX	15.01	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	
202	XX	15.03	Pembinaan dan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten Siak	
202	XX	15.04	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	
202	XX	15.05	Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu (PHI)	
202	XX	15.06	Sistem Informasi Gender	
202	XX	16	Program Perlindungan Anak	
202	XX	16.01	Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	
202	XX	16.05	Pembinaan Potensi dan Partisipasi Anak	
202	XX	16.06	Pembinaan dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	
203			Pangan	
203	XX	15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	
203	XX	15.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan	
203	XX	15.02	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	
203	XX	15.03	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	
203	XX	15.04	Pemantauan Akses, Pasokan dan Harga Pangan	
203	XX	15.05	Pengembangan dan pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	
203	XX	15.06	Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	
203	XX	16	PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN KONSUMSI PANGAN	
203	XX	16.01	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	
203	XX	16.02	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (agropolitan)	
203	XX	17	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	
203	XX	17.01	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	
204			Pertanahan	
204	XX	15	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	
204	XX	15.11	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	
204	XX	16	Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	
204	XX	16.07	Sertifikasi Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	
204	XX	16.13	Informasi tanah desa di Kecamatan Tualang	
204	XX	17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1			2	3
204	XX	17.01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
205			Lingkungan Hidup	
205	XX	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
205	XX	15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	
205	XX	15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	
205	XX	15.14	Peningkatan operasi dan pemeliharaan TPA kabupaten siak	
205	XX	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
205	XX	16.01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	
205	XX	16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	
205	XX	16.10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	
205	XX	16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	
205	XX	16.17	Kegiatan Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup	
205	XX	16.18	Kegiatan Penilaian AMDAL	
205	XX	16.19	Kegiatan Pengawasan AMDAL	
205	XX	16.20	Kegiatan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	
205	XX	17	Program perlindungan dan konservasi SDA	
205	XX	17.13	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan	
205	XX	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
205	XX	19.07	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	
206			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
206	XX	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
206	XX	15.12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	
206	XX	15.15	Pelayanan langsung Kartu Identitas Anak (KIA)	
206	XX	15.16	Pelayanan Keliling Pembuatan Akte Kelahiran	
206	XX	15.17	Pelayanan Keliling Pembuatan Kartu Keluarga	
206	XX	15.18	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	
207			Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
207	XX	20	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha ekonomi Kampung	
207	XX	20.02	Perlombaan Kampung binaan Program P2WKSS	
207	XX	20.03	Perlombaan Kampung dan kelurahan	
207	XX	20.07	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
207	XX	20.08	Kampung Binaan Keluarga Sakinah	
207	XX	20.12	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	
207	XX	20.16	Pembinaan Program Pemberdayaan Kampung (PPK)	
207	XX	20.17	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	
207	XX	21	Program Penguatan Pemerintahan Kampung	
207	XX	21.14	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	
207	XX	21.17	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif (Pemilihan Penghulu)	
207	XX	21.24	Pelatihan Aparatur Pemerintah Kampung dalam Bidang pengelolaan Keuangan Kampung	
207	XX	21.28	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kampung	
207	XX	21.31	Monitoring Pelaksanaan APBKam dan Pengelolaan Aset Kampung	
207	XX	21.32	Sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Kampung dan Aset Kampung	
208			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
208	XX	15	Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	
208	XX	15.03	Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi pada Momen Khusus	
208	XX	15.04	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR)	
208	XX	15.05	Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
208	XX	15.06	Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan KB/KR dan Pengendalian Kependudukan	
208	XX	15.07	Internalisasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan di Kabupaten Siak	
209			Perhubungan	
209	XX	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
209	XX	15.06	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
209	XX	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
209	XX	16.01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	
209	XX	16.05	Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	
209	XX	16.06	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan SDP	
209	XX	17	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	
209	XX	17.05	Pemanduan pejabat dan tamu-tamu daerah	
209	XX	19	Program Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	
209	XX	19.02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	
209	XX	20	Program peningkatan pelayanan angkutan	
209	XX	20.13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	
209	XX	20.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.	
209	XX	20.08	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	
209	XX	20.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	
209	XX	20.20	Pengoperasian dan pemeliharaan bus sekolah dan angkutan umum	
209	XX	21	Program Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	
209	XX	21.01	Penyediaan jasa dan pemeliharaan PJU Kabupaten Siak	
209	XX	21.02	Pemeliharaan Genset PLTD	
210			Komunikasi dan Informatika	
210	XX	15	Program Pengelolaan informasi dan komunikasi Publik	

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1			2	3
210	XX	15.01	Pengelolaan Informasi Publik	
210	XX	15.02	Pelayanan Informasi Publik	
210	XX	15.03	Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat	
210	XX	15.04	peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik	
210	XX	15.05	layanan interoperabilitas dan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan (Pusat API daerah)	
210	XX	15.06	Pengelolaan Saluran Komunikasi Milik PEMDA/Media Internal	
210	XX	15.07	Infotorial/mininfotorial pembangunan daerah melalui media cetak dengan pemerintah daerah	
210	XX	15.08	Penyebarluasan melalui media cetak	
210	XX	15.09	Penyebarluasan melalui media elektronik	
210	XX	15.10	Penyebarluasan melalui media internet/media on line	
210	XX	16	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	
210	XX	16.01	Penyelenggaraan dan Pengelolaan akses internet pemerintah dan publik	
210	XX	16.02	Penyelenggaraan dan Pengembangan Data Centre (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)	
210	XX	16.03	Pemeliharaan Infrastruktur Berbagi pakai e-Government	
210	XX	17	Program pengembangan e-government dan smart city	
210	XX	17.01	Layanan Sistem Informasi Smart City	
210	XX	17.02	penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Smart City	
210	XX	17.03	Pemeliharaan ekosistem smart city	
210	XX	17.04	Penyelenggaraan Infrastruktur Teleconference	
211			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
211	XX	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	
211	XX	16.01	Promosi komoditi unggulan daerah	
211	XX	16.02	Sosialisasi Dukungan Informasi Permodalan	
211	XX	16.03	Peningkatan kualitas produk UKM	
211	XX	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
211	XX	18.01	Pemeringkatan Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi (Dalam Rangka Tk. Kabupaten, Propinsi Pusat)	
211	XX	18.02	Peningkatan kinerja pelaku / Pengurus koperasi	
211	XX	18.03	Pelatihan peningkatan kompetensi bagi pengurus / pengelolaan koperasi	
211	XX	18.04	Pelatihan Audit dan Akuntansi Koperasi	
211	XX	18.05	Penguatan Kelembagaan Koperasi Berbasis Syariah	
212			Penanaman Modal	
212	XX	15	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
212	XX	15.01	Survey Perizinan	
212	XX	15.02	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	
212	XX	15.03	Penyelenggaraan Pameran Investasi	
212	XX	15.04	Monitoring Perizinan	
212	XX	16	Optimalisasi Pelayanan Publik	
212	XX	16.01	Pengadaan anjungan Informasi mandiri	
213			Kepemudaan dan Olah Raga	
213	XX	15	Program Peningkatan peran dan serta kepemudaan	
213	XX	15.01	Pembinaan organisasi kepemudaan	
213	XX	15.02	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibaraka setiap 17 Agustus	
213	XX	15.03	Pelatihan marchingband Kab. Siak	
213	XX	15.04	Pelatihan orkestra kab. Siak	
213	XX	16	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	
213	XX	16.01	Pembibitan dan pembinaan olahraga Sepak Takraw	
213	XX	16.02	Kejurda Tingkat Pelajar	
213	XX	16.03	Open Internasional Siak BMX Tahun 2017	
213	XX	16.04	Open Tour Internasional Siak 10 K Tahun 2017	
213	XX	16.05	Penyelenggaraan Event Sepatu Roda	
213	XX	17	Program Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga	
213	XX	17.01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	
214			Statistik	
214	XX	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI	
214	XX	15.01	Pencetakan data statistik daerah	
215			Persandian	
215	XX	15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi	
215	XX	15.01	Layanan keamanan informasi kepada sistem elektronik pemerintah Daerah	
216			Kebudayaan	
216	XX	16	Program pengelolaan kekayaan budaya	
216	XX	16.01	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala; museum dan peninggalan bawah air	
216	XX	17	Program pengelolaan keragaman budaya	
216	XX	17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	
216	XX	18	Program pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan	
216	XX	18.01	Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan	
216	XX	18.02	Pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu	PENAMBAHAN
217			Perpustakaan	
217	XX	15	Program Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan dan Budaya Baca	

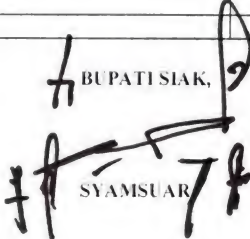
KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1			2	3
217	XX	15.01	Perpustakaan Digital (e Library)	
217	XX	15.02	Lomba Minat Baca	
217	XX	16	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	
217	XX	16.01	Supervisi:pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum;perpustakaan khusus;perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	
217	XX	16.02	Lomba Perpustakaan Kabupaten; Kampung; Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus	
218			Kearsipan	
218	XX	21	Program Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip	
218	XX	21.01	Pembinaan dan Pengelolaan Arsip	
218	XX	21.02	Restorasi Arsip/Dokumen Daerah	
3			URUSAH PEMERINTAHAN PILIHAN	
301			Kelautan dan Perikanan	
301	XX	15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
301	XX	15.01	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	
301	XX	15.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	
301	XX	16	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
301	XX	16.01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (DAK)	
301	XX	16.02	Lomba Masak Berbahan Serba Ikan dan Sosialisasi Gemar Makan Ikan	
302			Pariwisata	
302	XX	15	Program pemasaran pariwisata	
302	XX	15.01	Pekan Safar "Tradisi Ghatib Beghanyut" Ritual Tolak Bala	
302	XX	15.02	Penampilan dan festival seni kabupaten siak	
302	XX	15.03	Mengikuti festival dan parade	
302	XX	15.04	Penyelenggaraan Event Tour De Siak	
302	XX	15.05	Pemilihan bujang dan dara tingkat daerah	
302	XX	15.06	Pawai budaya Internasional	
302	XX	15.07	Lomba Sampan Internasional	
302	XX	15.08	Kejuaraan Pencak Silat dan Sepak Takraw Sijori Tahun 2017	
302	XX	15.09	Pelaksanaan Lomba Lintas Alam di Tahura SSH Minas	
302	XX	15.10	Festival Gasing Internasional Tahun 2017	
302	XX	15.11	Festival Siak Bermadah	
302	XX	16	Program Destinasi dan Industri Pariwisata	
302	XX	16.01	Pelatihan pelaku ekonomi kreatif	
302	XX	16.02	Penataan kawasan objek wisata (DAK)	
302	XX	16.03	Pembangunan taman burung (Lanjutan)	
302	XX	16.04	Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Istana Sultan Siak	
302	XX	16.05	Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Masjid Bersejarah	
303			Pertanian	
303	XX	15	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	
303	XX	15.01	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi	
303	XX	15.02	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung	
303	XX	15.03	Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan	
303	XX	15.04	Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura	
303	XX	15.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
303	XX	16	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	
303	XX	16.01	Peningkatan Produksi dan Mutu Sayur-sayuran	
303	XX	17	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	
303	XX	17.01	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	
303	XX	17.02	Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi	
303	XX	17.03	Pembangunan/ Perbaikan Sumber-sumber Air (DAK APBN)	
303	XX	18	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	
303	XX	18.01	Revitalisasi Lahan Perkebunan	
303	XX	18.02	Penanggulangan serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan.	
303	XX	18.03	Inventarisasi, klarifikasi dan penyelesaian permasalahan perkebunan	
303	XX	19	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
303	XX	19.01	Peningkatan kemampuan lembaga petani	
303	XX	19.02	Pekan Nasional (PENAS) KTNA	
303	XX	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	
303	XX	20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	
303	XX	20.02	Penilaian UPTD, Penyuluh dan Kelembagaan Petani Berprestasi	
303	XX	21	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Ternak dan Kesmavet	
303	XX	21.01	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	
303	XX	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	
303	XX	22.01	Pengembangan agribisnis peternakan	
303	XX	22.02	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
303	XX	22.03	Peningkatan sarana dan prasarana di Demplot Jatibaru	
303	XX	22.04	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	
303	XX	22.05	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	
305			Perdagangan	
305	XX	15	Program : Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	
305	XX	15.01	Pengawasan UTTP (SPBU, APMS, Pabrik Kelapa Sawit, Masyarakat)	

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1			2	3
305	XX	15.02	Pengawasan dan Pelayanan Tera (SPBU, APMS, Pabrik Kelapa Sawit, Masyarakat)	
305	XX	16	Pogram Pengembangan perdagangan dalam daerah	
305	XX	16.01	Monitoring fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat di Kab. Siak	
305	XX	16.02	Pengawasan pendistribusian paket kebutuhan pokok masyarakat bersubsidi	
305	XX	16.03	Pengembangan sarana perdagangan (pasar rakyat)	
305	XX	20	Program Pemgembangan Kinerja Pasar	
305	XX	20.01	Peningkatan Operasonal dan pemeliharaan Pasar	
305	XX	20.02	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk (pengembangan pasar) (DAK)	
305	XX	20.03	Pembangunan Pasar Sungai Apit	
306			Perindustrian	
306	XX	16	Program Penataan Struktur Industri	
306	XX	16.01	Penyusunan DED infrastruktur dasar / fasilitas kawasan industri	
307			Transmigrasi	
307	XX	15	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi	
307	XX	15.01	Perencanaan pengembangan dan pembangunan permukiman transmigrasi	
307	XX	16	Program Penyiapan, Pendataan dan informasi ketransmigrasian	
307	XX	16.07	Pelatihan pemberdayaan masyarakat transmigrasi	
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	
401			Perencanaan	
401	XX	18	Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
401	XX	18.05	Koordinasi pengembangan wilayah strategis	
401	XX	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
401	XX	21.01	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik	
401	XX	21.08	Penyusunan rancangan RKPD	
401	XX	21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	
401	XX	21.11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
401	XX	21.12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	
401	XX	21.15	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafoan Anggaran Sementara (PPAS)	
401	XX	21.16	Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	
401	XX	21.17	Publikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	
401	XX	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	
401	XX	22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	
401	XX	22.08	Monitoring Perencanaan Pembangunan bidang ekonomi dan keuangan	
401	XX	22.09	Kordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten siak	
401	XX	22.13	Survey perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan keuangan	
401	XX	22.02	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	
401	XX	23	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	
401	XX	23.04	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang air minum	
401	XX	23.05	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah	
401	XX	23.09	Survey perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah	
401	XX	23.10	Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah	
401	XX	26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
401	XX	26.01	Kordinasi penyusunan aksi PPK kabupaten siak	
401	XX	26.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang pembangunan manusia dan masyarakat	
401	XX	26.03	Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Deveploment Goals (SDG's) di Kabupaten Siak	
401	XX	26.04	Survey perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	
401	XX	26.05	Monitoring Perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat	
401	XX	27	Program perencanaan pembangunan bidang sosial	
401	XX	27.01	Koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang Sosial	
401	XX	27.02	Survey Perencanaan pembangunan Bidang Sosial	
401	XX	27.03	Monitoring perencanaan pembangunan Bidang Sosial	
401	XX	27.04	Basis data pembangunan bidang sosial	
402			Keuangan	
402	XX	15	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
402	XX	15.01	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	
402	XX	15.02	Penyusunan pelaporan penagihan piutang daerah	
402	XX	16	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
402	XX	16.01	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	
402	XX	16.02	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	
402	XX	16.03	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	
402	XX	16.04	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	
402	XX	16.05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	
402	XX	16.06	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	
402	XX	16.07	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	
402	XX	16.08	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	
402	XX	16.09	Peningkatan manajemen investasi	
402	XX	16.10	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pendataan pajak dan retribusi daerah)	
402	XX	16.11	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (penagihan pajak dan retribusi daerah)	
402	XX	16.12	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pendataan OP/SP PBB baru)	
402	XX	16.13	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Verifikasi data OP/SP PBB P2)	
402	XX	16.14	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pengelolaan data PBB P2 kab. siak)	

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1			2	3
402	XX	16.15	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (penagihan PBB P2 dan BPHTB kab. siak)	
402	XX	16.16	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	
402	XX	16.17	Penyusunan laporan barang milik daerah	
402	XX	16.18	Pengendalian, evaluasi pemanfaatan barang daerah dan hasil pengadaan	
402	XX	16.19	Pengamanan aset pemerintah kab. Siak	
402	XX	16.20	Peningkatan manajemen aset/barang daerah (perencanaan kebutuhan)	
402	XX	16.21	Sosialisasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	
402	XX	16.22	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (penerimaan daerah)	
402	XX	16.23	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	PENAMBAHAN
403			Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	
403	XX	15	Program Pengembangan Karir Pegawai Aparatur Sipil Negara	
403	XX	15.01	Pengelolaan penilaian kompetensi dan potensi Pejabat Struktural	
403	XX	15.02	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	
403	XX	15.03	Penataan Jabatan Pegawai ASN	
403	XX	16	Program Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara	
403	XX	16.02	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai ASN	
403	XX	16.03	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai ASN	
403	XX	16.07	Penyelenggaraan SKJ Pegawai	
403	XX	17	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	
403	XX	17.01	Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai ASN	
403	XX	17.03	Pengelolaan data dan informasi kepegawaian	
403	XX	18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai Aparatur Sipil Negara	
403	XX	18.01	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	
403	XX	18.02	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Pegawai ASN	
403	XX	18.07	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	
404			Penelitian dan Pengembangan	
404	XX	15	Program kerjasama pembangunan	
404	XX	15.01	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar negara	
404	XX	15.02	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	
404	XX	16	Program pengembangan data/informasi	
404	XX	16.01	Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah	
404	XX	16.02	Upgrade Aplikasi E-planing Kabupaten Siak	
405			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
405	XX	18	Program penyelenggaraan penanggulangan bencana	
405	XX	18.02	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana	
405	XX	18.03	Pengelolaan manajemen operasional PUSDALOPS	
405	XX	20	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	
405	XX	20.05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	
405	XX	20.07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	
405	XX	20.08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	
405	XX	20.09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	
405	XX	20.11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	
405	XX	20.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	
405	XX	20.13	Monitoring/evaluasi dan pelaporan	
405	XX	20.15	Peringatan HUT Damkar/rakornas Damkar	
405	XX	21	Program penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi	
405	XX	21.01	Pelatihan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	
405	XX	22	Program pencegahan dini dan mitigasi bencana	
405	XX	22.03	Pelatihan penanggulangan bencana berbasis pemberdayaan masyarakat (relawan	
405	XX	22.07	Fasilitasi desa siaga/tanggunh bencana	
406			Kesatuan Bangsa dan Politik	
406	XX	15	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	
406	XX	15.01	Penyiapan tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	
406	XX	15.09	Operasional komunitas intelijen daerah	
406	XX	15.11	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	
406	XX	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
406	XX	17.10	Pelatihan dasar bela negara	
406	XX	17.11	Peringatan Upacara Hari Bela Negara	
406	XX	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	
406	XX	21.03	Koordinasi forum -forum diskusi politik	
406	XX	21.05	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kab.Siak	
5			FUNGSI PENDUKUNG	
503			Sekretariat Daerah	
503	XX	15	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	
503	XX	15.05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	
503	XX	15.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	
503	XX	15.07	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	
503	XX	15.08	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah (APKASI)	
503	XX	15.09	Protokol Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
503	XX	15.10	Fasilitasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	
503	XX	15.11	Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1			2	3
503	XX	17	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	
503	XX	17.06	Fasilitasi Pembentukan UPTD/UPTB	
503	XX	18	Program peningkatan kualitas kelembagaan	
503	XX	18.08	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
503	XX	18.09	Fasilitasi penyusunan ANJAB dan ABK	
503	XX	18.10	Rakor Kelembagaan	
503	XX	18.11	Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	
503	XX	18.12	Survey Kepuasan Masyarakat	
503	XX	21	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
503	XX	21.02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	
503	XX	21.05	Publikasi peraturan perundang-undangan	
503	XX	21.06	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	
503	XX	22	Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur	
503	XX	22.01	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	
503	XX	23	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD	
503	XX	23.03	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	
503	XX	24	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	
503	XX	24.06	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	
503	XX	24.07	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	
503	XX	24.08	Fasilitasi Pengelolaan Sistem LAPORISP4N	
503	XX	24.09	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintah (Bed Nama)	
503	XX	24.10	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	
503	XX	25	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama	
503	XX	25.04	Pengiriman Jemaah Calon Haji dan Penjemputan Jemaah Haji Kabupaten Siak di Embarkasi	
503	XX	25.05	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	
503	XX	25.06	Pelaksanaan Ibadah Haji & Umroh oleh Pemerintah Kabupaten Siak	
503	XX	25.07	Safari Jum'at Pemerintah Kabupaten Siak	
503	XX	25.08	Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	
503	XX	26	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama	
503	XX	26.02	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	
503	XX	26.03	Pegiriman Keikutsertaan Kafilah Kabupaten Siak pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	
503	XX	26.09	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	
503	XX	27	Program Batas Wilayah Pemerintahan	
503	XX	27.01	Pelacakan dan Pengukuran Batas Antar Kecamatan dan Kabupaten/Kota	
503	XX	28	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
503	XX	28.15	Penyelesaian Masalah Proses Pengadaan Barang dan Jasa	
503	XX	29	Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian	
503	XX	29.01	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Produksi di Daerah	
503	XX	30	Program Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	
503	XX	30.01	Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	
503	XX	31	Program kerjasama informasi dengan Mass Media	
503	XX	31.08	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	
503	XX	31.09	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya	
503	XX	31.10	Ivent - Ivent Kehumasan	
503	XX	33	Program Jaminan Sosial	
503	XX	33.01	Penyaluran Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)	
503	XX	37	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
503	XX	37.02	Penyusunan standar satuan harga	
503	XX	37.46	Fasilitasi Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	
503	XX	37.47	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	
503	XX	37.50	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismon TEPR	
504			Sekretariat DPRD	
504	XX	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
504	XX	15.01	Pembahasan Rancangan PERDA	
504	XX	15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	
504	XX	15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	
504	XX	15.04	Rapat Rapat Paripurna	
504	XX	15.05	Kegiatan Reses	
504	XX	15.06	kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	
504	XX	15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	
504	XX	15.10	Badan legislasi DPRD Kabupaten Siak	
504	XX	15.11	Pelaksanaan Tugas-tugas Keprotokoleran DPRD Kabupaten Siak	
505			Inspektorat	
505	XX	15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
505	XX	15.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (PKTP)	

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1			2	3
505	XX	15.02	Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung	
505	XX	16	Program Peningkatan Kepatuhan Penyelesaian Tindak Lanjut	
505	XX	16.01	Inventarisasi temuan hasil pengawasan (Gelar Pengawasan Daerah)	
505	XX	16.02	Monitoring Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	
505	XX	16.03	Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	
505	XX	17	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	
505	XX	17.01	Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
505	XX	17.02	Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan SPIP	
505	XX	17.03	Laporan Pajak-Pajak Pegawai (LP2P)	
505	XX	18	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
505	XX	18.01	Evaluasi Atas Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	
505	XX	18.02	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
505	XX	18.03	Review Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Kab. Siak	
505	XX	18.04	Review Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang Jasa dan Realisasi Dana Kampung	
505	XX	19	Program Penanganan Kasus Pengaduan	
505	XX	19.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Kab. Siak	
505	XX	19.01	Penanganan Kasus Perselisihan Perkawinan ASN	
505	XX	20	Program Pencegahan Korupsi	
505	XX	20.01	Pembinaan Integritas Aparatur	
505	XX	20.02	Optimalisasi Pencegahan Korupsi	
505	XX	21	Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan dan Prosedur Pengawasan	
505	XX	21.01	Penyusunan dan penyempurnaan pedoman/juknis pelaksanaan standar prosedur pengawasan	
505	XX	22	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	
505	XX	22.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	
506			Sekretariat KORPRI	
506	XX	17	Program Fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI	
506	XX	17.01	Penyelenggaraan HUT KORPRI	
506	XX	17.02	Partisipasi KORPRI Kabupaten Siak pada Event-event Tingkat Provinsi/Nasional	
507			Kecamatan	
507	XX	31	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan	
507	XX	31.01	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	
507	XX	31.02	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kecamatan (MTQ kecamatan)	
507	XX	31.03	Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FASI)	
507	XX	31.04	Penyelenggaraan Siak Bermadah	
507	XX	31.05	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Siak (MTQ Kabupaten Siak)	
507	XX	31.06	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Kabupaten (PORKAB)	
507	XX	31.07	Penyelenggaraan Olimpiade Olah Rag Siswa Nasional (O2SN)	
507	XX	31.08	Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	
507	XX	31.09	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar daerah (POPDA)	
507	XX	31.10	Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	
507	XX	31.11	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kelurahan (MTQ Kelurahan)	
507	XX	31.12	Pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan	
507	XX	31.13	Penyelenggaraan Penanaman Perdana Benih Padi (Turun Bumi)	
507	XX	31.14	Penyelenggaraan Petang Megang (Ramadhan)	


 BUPATI SIAK,
 SYAMSUAR

**DAFTAR KODE AKUN APBD
 KABUPATEN SIAK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
41	Pendapatan Asli Daerah	
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	
4.1.1.01	Pajak Hotel	
4.1.1.01.01	Hotel Bintang Lima Berlian	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	
4.1.1.01.10	Motel	
4.1.1.01.11	Cottage	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	
4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata	
4.1.1.01.14	Gubuk Pariwisata	
4.1.1.02	Pajak Restoran	
4.1.1.02.01	Restoran	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	
4.1.1.02.03	Kafetaria	
4.1.1.02.04	Kantin	
4.1.1.02.05	Katering	
4.1.1.02.06	Warung	
4.1.1.02.06	Warung	
4.1.1.02.07	Bar	
4.1.1.02.08	Jasa Boga	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	
4.1.1.03.03	Kontes Kecantikan	
4.1.1.03.04	Kontes Binaraga	
4.1.1.03.05	Pameran	
4.1.1.03.06	Diskotik	
4.1.1.03.07	Karaoke	
4.1.1.03.08	Klub Malam	
4.1.1.03.09	Sirkus/akrobat/sulap	
4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	
4.1.1.03.11	Permainan Golf	
4.1.1.03.12	Permainan Bowling	
4.1.1.03.13	Pacuan Kuda	
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	
4.1.1.03.17	Mandi Uap/spa	
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	
4.1.1.04	Pajak Reklame	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/videotron/ megatron	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/stiker	
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	
4.1.1.04.06	Reklame Udara	
4.1.1.04.07	Reklame Apung	
4.1.1.04.08	Reklame Suara	
4.1.1.04.09	Reklame Film/slide	
4.1.1.04.10	Reklame Peragaan	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	
4.1.1.06	Pajak Parkir	
4.1.1.06.01	Pajak Parkir	
4.1.1.07	Pajak Air Tanah	
4.1.1.07.01	Pajak Air Tanah	
4.1.1.08	Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.1.08.01	Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.1.09	Pajak Lingkungan	
4.1.1.09.01	Pajak Lingkungan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.1.10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4.1.1.10.01	Asbes	
4.1.1.10.02	Batu Tulis	
4.1.1.10.03	Batu Setengah Permata	
4.1.1.10.04	Batu Kapur	
4.1.1.10.05	Batu Apung	
4.1.1.10.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.1.11.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4.1.1.12.1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	
4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
4.1.2.01.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
4.1.2.01.10	Retribusi Pelayanan Pendidikan	
4.1.2.01.11	Retribusi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	
4.1.2.01.12	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
4.1.2.01.13	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	
4.1.2.01.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
4.1.2.01.15	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	
4.1.2.02.07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Di hapus)	
4.1.2.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	
4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	
4.1.2.02.10	Retribusi Penyebrangan di air	
4.1.2.02.11	Retribusi Penyebrangan di air	
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
4.1.2.02.12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Di hapus)	
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan tertentu	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	
4.1.2.03.06	Retribusi Izin Peruntukan Tanah	
4.1.2.03.07	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	
4.1.2.03.08	Retribusi Izin Pengusahaan Penangkaran Sarung Burung Walet	
4.1.2.03.09	Retribusi di Bidang Perdagangan (SIUP/TDG/TDP)	
4.1.2.03.10	Retribusi Tenaga Kerja Asing	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
4.1.3.01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah	
4.1.3.01.02	BUMD	
4.1.3.02	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
4.1.3.02.01	BUMN	
4.1.3.03	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	
4.1.3.03.01	Perusahaan Patungan	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	
4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah	
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai	
4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	
4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.4.01.09	Penjualan Lampu Hias Bekas	
4.1.4.01.10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	
4.1.4.01.11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas	
4.1.4.01.12	Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi	
4.1.4.01.13	Penjualan hasil pertanian	
4.1.4.01.14	Penjualan hasil kehutanan	
4.1.4.01.15	Penjualan hasil perkebunan	
4.1.4.01.16	Penjualan hasil peternakan	
4.1.4.01.17	Penjualan hasil perikanan	
4.1.4.01.18	Penjualan hasil sitaan	
4.1.4.01.19	Penjualan Hasil Bersih Lelang Aset Daerah	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	
4.1.4.02.03	Jasa Giro Dana Cadangan	
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	
4.1.4.04.02	Kerugian Barang	
4.1.4.05	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
4.1.4.05.01	Penerimaan Komisi dari penempatan Kas daerah	
4.1.4.05.02	Penerimaan Potongan	
4.1.4.05.03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
4.1.4.06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	
4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat	
4.1.4.06.05	Bidang Penataan Ruang	
4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan	
4.1.4.06.07	Bidang Perhubungan	
4.1.4.06.08	Bidang Lingkungan Hidup	
4.1.4.06.09	Bidang Pertanahan	
4.1.4.06.10	Bidang Pertanian	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	
4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Di hapus)	
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	
4.1.4.07.09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan (Di hapus)	
4.1.4.07.13	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.4.07.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4.1.4.07.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4.1.4.07.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	
4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	
4.1.4.09.02	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	
4.1.4.09.03	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman	
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	
4.1.4.10.01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	
4.1.4.10.02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan	
4.1.4.10.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	
4.1.4.10.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas	
4.1.4.10.05	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka	
4.1.4.10.06	Pendapatan atas pinjaman lunak	
4.1.4.10.07	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya	
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
4.1.4.11.01	Fasilitas Sosial	
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum	
4.1.4.11.03	Sewa Aset Daerah	
4.1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
4.1.4.12.01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk	
4.1.4.12.02	Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan	
4.1.4.12.03	Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.4.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
4.1.4.13.01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	
4.1.4.13.02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan	
4.1.4.13.03	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah	
4.1.4.13.04	Bunga Pengembalian Angsuran Pinjaman Kredit PEK	
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4.1.4.14.1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	
4.1.4.15	Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya	
4.1.4.15.01	Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	
4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD	
4.1.4.17	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP)	
4.1.4.17.01	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
4.1.4.18	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
4.1.4.18.01	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satdik Sekolah Dasar Negeri	PENAMBAHAN
4.1.4.18.02	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satdik Sekolah Menengah Pertama Negeri	PENAMBAHAN
4.2	Dana Perimbangan	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	
4.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Di hapus)	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	
4.2.1.02.03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	
4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	
4.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	
4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	
4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	
4.2.3.01	Dana alokasi khusus	
4.2.3.01.01	Dana alokasi khusus	
4.2.3.01.02	Dana alokasi khusus fisik	
4.2.3.01.03	Dana alokasi khusus non fisik	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
4.3.1	Pendapatan Hibah	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
4.3.1.01.01	Pemerintah	
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya	
4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah	
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	
4.3.1.03.01	Badan/lembaga/organisasi swasta	
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	
4.3.1.04.01	Kelompok masyarakat/perorangan	
4.3.1.05	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
4.3.1.05.01	Pendapatan Hibah dari Bilateral	
4.3.1.05.02	Pendapatan Hibah dari Multilateral	
4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya	
4.3.2	Dana Darurat	
4.3.2.01	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
4.3.2.01.01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.02	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.02	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air (Di hapus)	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.04	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air	
4.3.3.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	
4.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (Di hapus)	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
4.3.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
4.3.3.03.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
4.3.3.04	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
4.3.3.04.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	
4.3.4.01.01	Dana Penyesuaian DAU	
4.3.4.01.02	Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan	
4.3.4.01.03	Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	
4.3.4.01.04	Dana Insentif Daerah	
4.3.4.01.05	Dana Desa	
4.3.4.02	Dana Otonomi Khusus	
4.3.4.02.01	Dana Otonomi Khusus	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	
4.3.5.02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
4.3.5.02.01	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten	
4.3.5.03	Bantuan Keuangan dari Kota	
4.3.5.03.01	Bantuan Keuangan Dari Kota	
4.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya	
4.3.6.01	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya	
4.3.6.01.01	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya	
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
5.1.1	Belanja Pegawai	
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	
5.1.1.01.10	Uang Paket	
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	
5.1.1.01.19	Tunjangan Daerah Terpencil	
5.1.1.01.20	Tunjangan Kesehatan DPRD	
5.1.1.01.21	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja	
5.1.1.01.22	Iuran Asuransi Kematian	
5.1.1.01.23	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	
5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru PNSD	
5.1.1.01.25	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	
5.1.1.01.26	Tunjangan Khusus Guru	PENAMBAHAN
5.1.1.01.27	Tunjangan Reses	PENAMBAHAN
5.1.1.01.28	Tunjangan Transportasi	PENAMBAHAN
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	
5.1.1.02.02	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	
5.1.1.02.03	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	
5.1.1.02.04	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	
5.1.1.03.02	Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.04.01	Biaya pemungutan PBB	
5.1.1.04.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Di hapus/kodering tidak dipakai lagi)	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5.1.2	Belanja Bunga	
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	
5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
5.1.2.01.02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	
5.1.2.01.04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
5.1.2.02	Bunga Utang Obligasi	
5.1.2.02.01	Bunga Utang Obligasi	
5.1.3	Belanja Subsidi	
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	
5.1.3.01.02	Belanja Subsidi kepada Lembaga	
5.1.4	Belanja Hibah	
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	
5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat	
5.1.4.01.02	Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)	
5.1.4.01.03	Belanja Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum	
5.1.4.01.04	Belanja Hibah Kepada Tentara Manunggal Membangun Desa	
5.1.4.01.05	Belanja Hibah Kepada Kepolisian Resor	
5.1.4.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5.1.4.02.01	Pemerintah Provinsi	
5.1.4.02.02	Pemerintah Kabupaten/Kota	
5.1.4.03	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah	
5.1.4.03.01	Perusahaan Daerah	
5.1.4.04	Belanja Hibah kepada Masyarakat	
5.1.4.04.01	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Siak	
5.1.4.04.02	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Sei Apit	
5.1.4.04.03	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Minas	
5.1.4.04.04	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Kandis	
5.1.4.04.05	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Tualang	
5.1.4.04.06	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Dayun	
5.1.4.04.07	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Bunga Raya	
5.1.4.04.08	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Koto Gasib	
5.1.4.04.09	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Sungai Mandau	
5.1.4.04.10	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Lubuk Dalam	
5.1.4.04.11	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Kerinci Kanan	
5.1.4.04.12	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Sabak Auh	
5.1.4.04.13	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Pusako	
5.1.4.04.14	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Mempura	
5.1.4.04.15	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Siak	
5.1.4.04.16	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Sungai Apit	
5.1.4.04.17	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Minas	
5.1.4.04.18	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Dayun	
5.1.4.04.19	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Kerinci Kanan	
5.1.4.04.20	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Bunga Raya	
5.1.4.04.21	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Sungai Mandau	
5.1.4.04.22	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Kandis	
5.1.4.04.23	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Koto Gasib	
5.1.4.04.24	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Lubuk Dalam	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.4.04.25	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Sabak Auh	
5.1.4.04.26	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Mempura	
5.1.4.04.27	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Pusako	
5.1.4.04.28	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Tualang	
5.1.4.04.29	Penghargaan kepada Pokmas - Pokmas yang Berprestasi dalam pelaksanaan Spesific Grant	
5.1.4.04.30	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Minas	
5.1.4.04.31	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Siak	
5.1.4.04.32	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Sungai Apit	
5.1.4.04.33	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Tualang	
5.1.4.04.34	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Kandis	
5.1.4.04.35	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Madrasah Negeri	
5.1.4.04.36	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Mempura	
5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	
5.1.4.05.01	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	
5.1.4.05.02	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan	
5.1.4.05.03	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kepemudaan, Budaya, Kesenian dan Olahraga	
5.1.4.05.04	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan	
5.1.4.05.05	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Ekonomi dan Sosial	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Terencana	
5.1.5.01.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Tidak Terencana	
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga non Pemerintah	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga non Pemerintah	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
5.1.6.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	
5.1.6.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	
5.1.6.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.02.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.04.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintahan Desa dan Partai Politik	
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	
5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota	
5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya	
5.1.7.04.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	
5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	
5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PAN	
5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PDI-P	
5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar	
5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PKS	
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PPP	
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PKB	
5.1.7.05.09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PDS	
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PBB	
5.1.7.05.11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra	
5.1.7.05.12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PPRN	
5.1.7.05.13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura	
5.1.7.05.14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Buruh	
5.1.7.05.15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat (NasDem)	
5.1.7.05.16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	
5.2	BELANJA LANGSUNG	
5.2.1	Belanja Pegawai	
5.2.1.01	Honorarium PNS	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	
5.2.1.01.03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	
5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Peneliti Pelaksana Kontrak	
5.2.1.01.06	Honorarium Staf PPTK	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	
5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	
5.2.1.03	Uang Lembur	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	
5.2.1.04	Belanja Pegawai Dana BOS	
5.2.1.04.01	Belanja Pegawai Dana BOS	
5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	
5.2.1.06	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	PENAMBAHAN
5.2.1.06.01	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	PENAMBAHAN
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	
5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar battery kering)	
5.2.2.01.04	Belanja perangko materai dan benda pos lainnya	
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	
5.2.2.01.09	Belanja bahan habis pakai material kesehatan	
5.2.2.01.10	Belanja bahan habis pakai material laboratorium	
5.2.2.01.11	Belanja bahan habis pakai material besi	
5.2.2.01.12	Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit	
5.2.2.01.13	Belanja bahan habis pakai radiologi	
5.2.2.01.14	Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor	
5.2.2.01.15	Belanja bahan kelengkapan pertukangan	
5.2.2.01.16	Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin	
5.2.2.01.17	Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika	
5.2.2.01.18	Belanja bahan habis pakai radiologi	
5.2.2.01.19	Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan	
5.2.2.01.20	Belanja bahan pengharum ruangan	
5.2.2.01.21	Belanja bahan pelumas	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	
5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	
5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	
5.2.2.02.06	Belanja tas kegiatan	
5.2.2.02.07	Belanja bahan logistik rumah tangga	
5.2.2.02.08	Belanja Plakat, Souvenir dan Figura	
5.2.2.02.09	Belanja dekorasi	
5.2.2.02.10	Belanja dokumentasi	
5.2.2.02.11	Belanja bahan arsip dokumen	
5.2.2.02.12	Belanja kelengkapan olah raga	
5.2.2.02.13	Belanja bahan specimen	
5.2.2.02.14	Belanja bahan inseminasi buatan	
5.2.2.02.15	Belanja bahan pakan ternak	
5.2.2.02.17	Belanja bahan publikasi	
5.2.2.02.18	Belanja bahan makan ternak	
5.2.2.02.19	Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara	
5.2.2.02.20	Belanja bahan pupuk	
5.2.2.02.21	Belanja baju pasien	
5.2.2.02.22	Belanja bahan pestisida	
5.2.2.02.23	Belanja bahan citra satelit/foto udara	
5.2.2.02.24	Belanja Cetak Sawah	
5.2.2.02.25	Belanja Sarana Penunjang Perikanan	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	
5.2.2.03.01	Belanja jasa telepon	
5.2.2.03.02	Belanja jasa air	
5.2.2.03.03	Belanja jasa listrik	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.2.03.04	Belanja jasa pengumuman lelang / pemenang lelang	
5.2.2.03.05	Belanja berlangganan surat kabar / majalah	
5.2.2.03.06	Belanja jasa kawat / faksimili / internet	
5.2.2.03.07	Belanja jasa paket / pengiriman	
5.2.2.03.08	Belanja jasa sertifikasi	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	
5.2.2.03.10	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
5.2.2.03.11	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi	
5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	
5.2.2.03.14	Belanja jasa administrasi peserta	
5.2.2.03.15	Belanja jasa perawatan kesehatan	
5.2.2.03.16	Belanja jasa administrasi pengolahan arsip SKPKD/KPKD	
5.2.2.03.17	Belanja jasa analisis di laboratorium	
5.2.2.03.18	Belanja jasa dekorasi	
5.2.2.03.19	Belanja jasa Administrasi Pimpinan/Ajudan	
5.2.2.03.20	Belanja jasa administrasi kantor/Administrasi Pengelola Keuangan/Operator Komputer/Outsourcing /Tenaga Lainnya	
5.2.2.03.21	Belanja jasa keamanan kantor	
5.2.2.03.22	Belanja jasa kebersihan kantor	
5.2.2.03.23	Belanja jasa Petugas lainnya	
5.2.2.03.24	Belanja jasa Petugas Pertamanan, Pemakaman, Pasar, Listrik PLTD dan PJU	
5.2.2.03.25	Belanja jasa Petugas Pemadam Kebakaran	
5.2.2.03.26	Belanja jasa Pengurus Rumah Rehabilitasi	
5.2.2.03.27	Belanja jasa pelatih	
5.2.2.03.28	Belanja Jasa Tenaga Sistem Informasi/Teknis Informatika/Programmer/Aplikasi Komputer dan Komunikasi	
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	
5.2.2.03.31	Belanja Jasa penyuluh lapangan	
5.2.2.03.32	Belanja Jasa pendampingan keuangan desa	
5.2.2.03.33	Belanja Jasa Tenaga Teknis/Pendukung Unit Layanan Pengadaan (ULP)	
5.2.2.03.34	Belanja Jasa Penunjang Kegiatan/Operasional Program Kemasyarakatan	
5.2.2.03.35	Belanja Jasa Petugas Speed Boad Patroli, Kapal Ferry, Bus Air dan Tug Boat	
5.2.2.03.36	Belanja Jasa Petugas Siak TV dan Radio Penyiaran Kabupaten (RPIK)	
5.2.2.03.37	Belanja Jasa Instruktur Senam	
5.2.2.03.38	Belanja Jasa Petugas Pelaksana UPTD SPAM	
5.2.2.03.39	Belanja Jasa Petugas Kebersihan, TPA (BHL), Peralatan dan Perbengkelan Alat Berat, Venue Olah Raga, Situs Peninggalan Bersejarah dan Objek Wisata	
5.2.2.03.40	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kantor/Tenaga Lainnya (SK Bupati Siak)	
5.2.2.03.41	Belanja Jasa Tenaga Kesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial	
5.2.2.03.42	Belanja Jasa Program Pemberdayaan Kampung (PPK)	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Non PNS	
5.2.2.04.04	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Kematian Non PNS	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service kendaraan bermotor	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang kendaraan bermotor	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas kendaraan bermotor	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR kendaraan bermotor	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	
5.2.2.05.06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	
5.2.2.06.03	Belanja penjiilidan	
5.2.2.06.04	Belanja layout dan typesetting	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	
5.2.2.07.04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	
5.2.2.07.05	Belanja sewa tanah	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	
5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	
5.2.2.08.03	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	
5.2.2.09.01	Belanja sewa Eskavator	
5.2.2.09.02	Belanja sewa Buldoser	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	
5.2.2.10.02	Belanja sewa komputer dan printer	
5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya	
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya	
5.2.2.10.08	Belanja sewa mesin peralatan kerja	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.2.10.09	Belanja sewa GPS	
5.2.2.10.10	Belanja sewa Kompas	
5.2.2.10.11	Belanja sewa Mesin Bor	
5.2.2.10.12	Belanja sewa planimeter	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
5.2.2.12.01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	
5.2.2.12.06	Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	
5.2.2.13.02	Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	
5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI	
5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	
5.2.2.14.05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	
5.2.2.16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
5.2.2.16.01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	
5.2.2.16.02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah	
5.2.2.17	Belanja Pemulangan Pegawai	
5.2.2.17.01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah	
5.2.2.17.02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah	
5.2.2.17.03	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	
5.2.2.18	Belanja Jasa Publikasi	
5.2.2.18.01	Belanja Jasa Publikasi Media Cetak	
5.2.2.18.02	Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual	
5.2.2.18.03	Belanja Jasa Publikasi Media Internet	
5.2.2.19	Belanja Jasa Kebersihan	
5.2.2.19.01	Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga	
5.2.2.20	Belanja Jasa Keamanan	
5.2.2.20.01	Belanja Jasa Keamanan	
5.2.2.21	Belanja Pajak	
5.2.2.21.01	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	
5.2.2.22	Belanja Pemeliharaan	
5.2.2.22.01	Belanja Pemeliharaan	
5.2.2.22.02	Belanja Pemeliharaan Jalan	
5.2.2.22.03	Belanja Pemeliharaan Jembatan	
5.2.2.22.04	Belanja Pemeliharaan Sungai, Suak, dan Saluran Air	
5.2.2.23	Belanja Jasa Konsultansi	
5.2.2.23.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	
5.2.2.23.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	
5.2.2.23.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	
5.2.2.24	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
5.2.2.24.01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	
5.2.2.24.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	
5.2.2.24.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	
5.2.2.24.04	Belanja beasiswa tugas belajar S3	
5.2.2.24.05	Belanja Beasiswa Izin Belajar Bagi PNS	
5.2.2.25	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
5.2.2.25.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	
5.2.2.25.02	Belanja Sosialisasi	
5.2.2.25.03	Belanja Kepesertaan	
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	
5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	
5.2.2.27	Belanja Hibah Barang dan Jasa	
5.2.2.27.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	
5.2.2.27.02	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	
5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
5.2.2.28.02	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	
5.2.2.29	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	
5.2.2.29.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	
5.2.2.30	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli	
5.2.2.30.01	Honorarium narasumber/tenaga ahli	
5.2.2.30.02	Akomodasi narasumber/tenaga ahli	
5.2.2.30.03	Transport narasumber/tenaga ahli	
5.2.2.31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	
5.2.2.31.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	
5.2.2.31.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	
5.2.2.32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer)	
5.2.2.32.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer)	
5.2.2.33	Belanja Beasiswa Pendidikan	
5.2.2.33.01	Bantuan Praja IPDN	
5.2.2.34	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5.2.2.34.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	
5.2.2.34.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
5.2.2.35	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5.2.2.35.01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	
5.2.2.35.02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	
5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	PENAMBAHAN
5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	PENAMBAHAN
5.2.2.37	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	PENAMBAHAN
5.2.2.37.01	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	PENAMBAHAN
5.2.3	Belanja Modal	
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	
5.2.3.01.01	Belanja modal pengadaan tanah kantor	
5.2.3.01.02	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit	
5.2.3.01.03	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas	
5.2.3.01.04	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik	
5.2.3.01.05	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak	
5.2.3.01.06	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	
5.2.3.01.07	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	
5.2.3.01.08	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	
5.2.3.01.09	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus	
5.2.3.01.10	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus	
5.2.3.01.11	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan	
5.2.3.01.12	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti jompo	
5.2.3.01.13	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum terminal	
5.2.3.01.14	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum dermaga	
5.2.3.01.15	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis	
5.2.3.01.16	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan	
5.2.3.01.17	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan	
5.2.3.01.18	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar	
5.2.3.01.19	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah	
5.2.3.01.20	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum taman	
5.2.3.01.21	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat	
5.2.3.01.22	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum ibadah	
5.2.3.01.23	Belanja modal pengadaan tanah sarana stadion olahraga	
5.2.3.01.24	Belanja modal pengadaan tanah perumahan	
5.2.3.01.25	Belanja modal pengadaan tanah pertanian	
5.2.3.01.26	Belanja modal pengadaan tanah perkebunan	
5.2.3.01.27	Belanja modal pengadaan tanah perikanan	
5.2.3.01.28	Belanja modal pengadaan tanah peternakan	
5.2.3.01.29	Belanja modal pengadaan tanah perkampungan	
5.2.3.01.30	Belanja modal pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku	
5.2.3.01.31	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum Jalan	
5.2.3.01.32	Belanja modal pengadaan tanah kawasan industri	
5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
5.2.3.02.01	Belanja modal pengadaan traktor	
5.2.3.02.02	Belanja modal pengadaan bulldozer	
5.2.3.02.03	Belanja modal pengadaan stoom wals	
5.2.3.02.04	Belanja modal pengadaan eskavator	
5.2.3.02.05	Belanja modal pengadaan dump truk	
5.2.3.02.06	Belanja modal pengadaan crane	
5.2.3.02.07	Belanja modal pengadaan kendaraan penyapu jalan	
5.2.3.02.08	Belanja modal pengadaan mesin pengolah semen	
5.2.3.02.09	Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih	
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
5.2.3.03.01	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	
5.2.3.03.02	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep	
5.2.3.03.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.03.04	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	
5.2.3.03.05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	
5.2.3.03.06	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	
5.2.3.03.07	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)	
5.2.3.03.08	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks	
5.2.3.03.09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	
5.2.3.03.10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	
5.2.3.03.11	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	
5.2.3.03.12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	
5.2.3.03.13	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator	
5.2.3.03.14	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan	
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
5.2.3.04.01	Belanja modal pengadaan gerobak	
5.2.3.04.02	Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong	
5.2.3.04.03	Belanja modal pengadaan becak	
5.2.3.04.04	Belanja modal pengadaan sepeda	
5.2.3.04.05	Belanja modal pengadaan karavan	
5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	
5.2.3.05.01	Belanja modal pengadaan kapal motor	
5.2.3.05.02	Belanja modal pengadaan kapal feri	
5.2.3.05.03	Belanja modal pengadaan speed boat	
5.2.3.05.04	Belanja modal pengadaan motor boat/motor tempel	
5.2.3.05.05	Belanja modal pengadaan hydro foil	
5.2.3.05.06	Belanja modal pengadaan jet foil	
5.2.3.05.07	Belanja modal pengadaan kapal tug boat	
5.2.3.05.08	Belanja modal pengadaan kapal tanker	
5.2.3.05.09	Belanja modal pengadaan kapal kargo	
5.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	
5.2.3.06.01	Belanja modal pengadaan perahu layar	
5.2.3.06.02	Belanja modal pengadaan perahu sampan	
5.2.3.06.03	Belanja modal pengadaan perahu tongkang	
5.2.3.06.04	Belanja modal pengadaan perahu karet	
5.2.3.06.05	Belanja modal pengadaan perahu rakit	
5.2.3.06.06	Belanja modal pengadaan perahu sekoci	
5.2.3.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	
5.2.3.07.01	Belanja modal pengadaan pesawat kargo	
5.2.3.07.02	Belanja modal pengadaan pesawat penumpang	
5.2.3.07.03	Belanja modal pengadaan pesawat helikopter	
5.2.3.07.04	Belanja modal pengadaan pesawat pemadam kebakaran	
5.2.3.07.05	Belanja modal pengadaan pesawat capung	
5.2.3.07.06	Belanja modal pengadaan pesawat terbang ampibi	
5.2.3.07.07	Belanja modal pengadaan pesawat terbang layang	
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	
5.2.3.08.01	Belanja modal pengadaan mesin las	
5.2.3.08.02	Belanja modal pengadaan mesin bubut	
5.2.3.08.03	Belanja modal pengadaan mesin dongkrak	
5.2.3.08.04	Belanja modal pengadaan mesin kompresor	
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras	
5.2.3.08.06	Belanja modal pengadaan Dinamo	
5.2.3.08.07	Belanja modal pengadaan mesin packaging	
5.2.3.08.08	Belanja modal pengadaan generator	
5.2.3.08.09	Belanja modal pengadaan peralatan pertukangan	
5.2.3.08.10	Belanja modal pengadaan peralatan kelistrikan	
5.2.3.08.11	Belanja modal pengadaan peralatan teknisi elektronika	
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	
5.2.3.09.01	Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian	
5.2.3.09.02	Belanja modal pengadaan alat pengering gabah	
5.2.3.09.03	Belanja modal pengadaan mesin bajak	
5.2.3.09.04	Belanja modal pengadaan alat penetas	
5.2.3.09.05	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman	
5.2.3.09.06	Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan ternak	
5.2.3.09.07	Belanja modal pengadaan peralatan RPH/RPU	
5.2.3.09.08	Belanja modal pengadaan alat inseminasi buatan	
5.2.3.09.09	Belanja modal pengadaan karamba	
5.2.3.09.10	Belanja modal pengadaan jaring, pukat dan sejenisnya	
5.2.3.09.11	Belanja modal pengadaan kincir	
5.2.3.09.12	Belanja modal pengadaan mesin penyuling	
5.2.3.09.13	Belanja modal pengadaan mesin penggiling	
5.2.3.09.14	Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan	
5.2.3.09.15	Belanja modal pengadaan mesin pengurai hasil pertanian	
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	
5.2.3.10.01	Belanja modal pengadaan mesin tik	
5.2.3.10.02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	
5.2.3.10.03	Belanja modal pengadaan mesin stensil	
5.2.3.10.04	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy	
5.2.3.10.05	Belanja modal pengadaan mesin cetak	
5.2.3.10.06	Belanja modal pengadaan mesin jilid	
5.2.3.10.07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	
5.2.3.10.08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	
5.2.3.10.09	Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik	
5.2.3.10.10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.10.11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan peralatan audio visual	
5.2.3.10.13	Belanja modal pengadaan alat pompa	
5.2.3.10.14	Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)	
5.2.3.10.15	Belanja modal pengadaan genset	
5.2.3.10.16	Belanja modal pengadaan peralatan laundry	
5.2.3.10.17	Belanja modal pengadaan Trafo	
5.2.3.10.18	Belanja modal pengadaan mesin laminating	
5.2.3.10.19	Belanja modal pengadaan mesin fogging	
5.2.3.10.20	Belanja modal pengadaan spraycan dan hand sprayer (alat penyemprot)	
5.2.3.10.21	Belanja modal pengadaan peralatan Packaging	
5.2.3.10.22	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman	
5.2.3.10.23	Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya	
5.2.3.10.24	Belanja modal pengadaan alat musik	
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	
5.2.3.11.01	Belanja modal pengadaan meja gambar	
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	
5.2.3.11.03	Belanja modal pengadaan brankas	
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	
5.2.3.11.05	Belanja modal pengadaan white board	
5.2.3.11.06	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu	
5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan penyekat ruangan	
5.2.3.11.10	Belanja modal pengadaan kipas angin	
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	
5.2.3.12.01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	
5.2.3.12.05	Belanja modal pengadaan scanner	
5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor/display	
5.2.3.12.07	Belanja modal pengadaan CPU	
5.2.3.12.08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk, speaker)	
5.2.3.12.10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	
5.2.3.12.11	Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer	
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	
5.2.3.13.02	Belanja modal pengadaan meja rapat	
5.2.3.13.03	Belanja modal pengadaan meja makan	
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	
5.2.3.13.06	Belanja modal pengadaan kursi makan	
5.2.3.13.07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	
5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	
5.2.3.13.09	Belanja modal pengadaan perabot ruangan (rak buku / rak tv)	
5.2.3.13.10	Belanja modal pengadaan filling cabinet dan lemari besi	
5.2.3.13.11	Belanja modal pengadaan perabot penghias ruangan (vas bunga dll)	
5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Sekolah	
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	
5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan tabung gas	
5.2.3.14.02	Belanja modal pengadaan kompor gas	
5.2.3.14.03	Belanja modal pengadaan lemari makan	
5.2.3.14.04	Belanja modal pengadaan dispenser	
5.2.3.14.05	Belanja modal pengadaan kulkas	
5.2.3.14.06	Belanja modal pengadaan rak piring	
5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan peralatan makan (piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau)	
5.2.3.14.08	Belanja modal pengadaan tungku besi	
5.2.3.14.09	Belanja modal pengadaan peralatan masak (dandang / wajan / kuai dan sejenisnya)	
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	
5.2.3.15.01	Belanja modal pengadaan lampu hias	
5.2.3.15.02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya	
5.2.3.15.04	Belanja modal pengadaan karpet	
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	
5.2.3.16.02	Belanja modal pengadaan handycam	
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	
5.2.3.16.04	Belanja modal pengadaan peralatan Audio	
5.2.3.16.05	Belanja Modal pengadaan Peralatan Pemancar Radio dan Televisi	
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
5.2.3.17.01	Belanja modal pengadaan telepon	
5.2.3.17.02	Belanja modal pengadaan faximili	
5.2.3.17.03	Belanja modal pengadaan radio SSB	
5.2.3.17.04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	
5.2.3.17.05	Belanja modal pengadaan radio VHF	
5.2.3.17.06	Belanja modal pengadaan radio UHF	
5.2.3.17.07	Belanja modal pengadaan alat sandi	
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	
5.2.3.18.01	Belanja modal pengadaan timbangan	
5.2.3.18.02	Belanja modal pengadaan teodolite	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.18.03	Belanja modal pengadaan alat uji emisi	
5.2.3.18.04	Belanja modal pengadaan alat GPS	
5.2.3.18.05	Belanja modal pengadaan kompas/peralatan navigasi	
5.2.3.18.06	Belanja modal pengadaan barometer	
5.2.3.18.07	Belanja modal pengadaan seismograph	
5.2.3.18.08	Belanja modal pengadaan ultrasonograph	
5.2.3.18.09	Belanja modal pengadaan alat Automatic Water Level Recording (AWLR)	
5.2.3.18.10	Belanja modal pengadaan alat ARR	
5.2.3.18.11	Belanja modal pengadaan alat ukur panjang	
5.2.3.18.12	Belanja modal pengadaan bejana ukur	
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	
5.2.3.19.01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	
5.2.3.19.02	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	
5.2.3.19.03	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran THT	
5.2.3.19.04	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata	
5.2.3.19.05	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah	
5.2.3.19.06	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak	
5.2.3.19.07	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	
5.2.3.19.08	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin	
5.2.3.19.09	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi	
5.2.3.19.10	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran neurologi	
5.2.3.19.11	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi	
5.2.3.19.12	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan	
5.2.3.19.13	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi	
5.2.3.19.14	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran penyakit dalam/internis	
5.2.3.19.15	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rawat darurat	
5.2.3.19.16	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiologi	
5.2.3.19.17	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiotherapi	
5.2.3.19.18	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anasthesi	
5.2.3.19.19	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran forensik	
5.2.3.19.20	Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan gizi	
5.2.3.19.21	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rehabilitasi medik	
5.2.3.19.22	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran prostodentie	
5.2.3.19.23	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthodontie	
5.2.3.19.24	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran patologi klinik	
5.2.3.19.25	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran patologi anatomi	
5.2.3.19.26	Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis	
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	
5.2.3.20.01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	
5.2.3.20.02	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	
5.2.3.20.03	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	
5.2.3.20.04	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pertanian	
5.2.3.20.05	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	
5.2.3.20.06	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan	
5.2.3.20.07	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	
5.2.3.20.08	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	
5.2.3.20.09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	
5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	
5.2.3.21.02	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over	
5.2.3.21.03	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan under pass	
5.2.3.21.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Landasan Pesawat Udara	
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	
5.2.3.22.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung	
5.2.3.22.02	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton	
5.2.3.22.03	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	
5.2.3.22.04	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	
5.2.3.22.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan timbang	
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	
5.2.3.23.01	Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan	
5.2.3.23.02	Belanja modal pengadaan konstruksi waduk	
5.2.3.23.03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	
5.2.3.23.04	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal bawah tanah	
5.2.3.23.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	
5.2.3.23.06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	
5.2.3.23.07	Belanja modal pengadaan konstruksi reservoir	
5.2.3.23.08	Belanja modal pengadaan konstruksi pintu air	
5.2.3.23.09	Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai	
5.2.3.23.10	Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai	
5.2.3.23.11	Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan penataan kawasan danau	
5.2.3.23.12	Belanja modal pengadaan konstruksi air bawah tanah	
5.2.3.23.13	Belanja modal pengadaan konstruksi sumur dan pengeboran	
5.2.3.23.14	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	
5.2.3.23.15	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan kolam dan sejenisnya	
5.2.3.23.16	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pabrik dan sejenisnya	
5.2.3.23.17	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan balai	
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
5.2.3.24.01	Belanja modal pengadaan lampu hias jalan	
5.2.3.24.02	Belanja modal pengadaan lampu hias taman	
5.2.3.24.03	Belanja modal pengadaan lampu penerang hutan kota	
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	
5.2.3.25.02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	
5.2.3.25.03	Belanja modal pengadaan peralatan pembangkit listrik	
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	
5.2.3.26.02	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan	
5.2.3.26.03	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	
5.2.3.26.04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	
5.2.3.26.05	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah	
5.2.3.26.06	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	
5.2.3.26.07	Belanja modal pengadaan konstruksi tugu peringatan	
5.2.3.26.08	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung klinik	
5.2.3.26.09	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum	
5.2.3.26.10	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kesenian	
5.2.3.26.11	Belanja modal pengadaan Jerjak	
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	
5.2.3.27.01	Belanja modal pengadaan buku matematika	
5.2.3.27.02	Belanja modal pengadaan buku fisika	
5.2.3.27.03	Belanja modal pengadaan buku kimia	
5.2.3.27.04	Belanja modal pengadaan buku biologi	
5.2.3.27.05	Belanja modal pengadaan buku biografi	
5.2.3.27.06	Belanja modal pengadaan buku geografi	
5.2.3.27.07	Belanja modal pengadaan buku astronomi	
5.2.3.27.08	Belanja modal pengadaan buku arkeologi	
5.2.3.27.09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra	
5.2.3.27.10	Belanja modal pengadaan buku keagamaan	
5.2.3.27.11	Belanja modal pengadaan buku sejarah	
5.2.3.27.12	Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya	
5.2.3.27.13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	
5.2.3.27.14	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	
5.2.3.27.15	Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	
5.2.3.27.16	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	
5.2.3.27.17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia	
5.2.3.27.18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa	
5.2.3.27.19	Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan	
5.2.3.27.20	Belanja modal pengadaan buku industri dan perdagangan	
5.2.3.27.21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	
5.2.3.27.22	Belanja modal pengadaan buku naskah	
5.2.3.27.23	Belanja modal pengadaan terbitan berkala (jurnal, compact disk)	
5.2.3.27.24	Belanja modal pengadaan mikrofilm	
5.2.3.27.25	Belanja modal pengadaan peta / atlas / globe	
5.2.3.27.26	Belanja modal pengadaan buku pertanian	
5.2.3.27.27	Belanja modal pengadaan buku Bahasa Inggris	
5.2.3.27.28	Belanja modal pengadaan buku Karya Umum	
5.2.3.27.29	Belanja modal pengadaan buku filsafat	
5.2.3.27.30	Belanja modal pengadaan buku ilmu sosial	
5.2.3.27.31	Belanja modal pengadaan buku ilmu murni	
5.2.3.27.32	Belanja modal pengadaan buku terapan	
5.2.3.27.33	Belanja modal pengadaan buku kesenian dan olahraga	
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	
5.2.3.28.01	Belanja modal pengadaan lukisan / foto	
5.2.3.28.02	Belanja modal pengadaan patung	
5.2.3.28.03	Belanja modal pengadaan ukiran	
5.2.3.28.04	Belanja modal pengadaan pahatan	
5.2.3.28.05	Belanja modal pengadaan batu alam	
5.2.3.28.06	Belanja modal pengadaan maket / miniatur / diorama	
5.2.3.28.07	Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus	
5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	
5.2.3.29.01	Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang	
5.2.3.29.02	Belanja modal pengadaan ternak	
5.2.3.29.03	Belanja modal pengadaan tanaman	
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
5.2.3.30.01	Belanja modal pengadaan senjata api	
5.2.3.30.02	Belanja modal pengadaan radar	
5.2.3.30.03	Belanja modal pengadaan mobil water canon	
5.2.3.30.04	Belanja modal pengadaan borgol	
5.2.3.30.05	Belanja modal pengadaan sangkur/bayonet	
5.2.3.30.06	Belanja modal pengadaan perisai/tameng	
5.2.3.30.07	Belanja modal pengadaan detektor logam	
5.2.3.30.08	Belanja modal pengadaan rompi anti peluru	
5.2.3.30.09	Belanja modal pengadaan pentungan	
5.2.3.30.10	Belanja modal pengadaan helm	
5.2.3.30.11	Belanja modal pengadaan alarm/sirene	
5.2.3.30.12	Belanja modal pengadaan sentolop/senter	
5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang / Papan Petunjuk	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Pengadaan rambu / plang petunjuk jalan	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	
5.2.3.31.03	Belanja Modal Pengadaan rambu / plang petunjuk pariwisata	
5.2.3.32	Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga	
5.2.3.32.01	Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.33	Belanja Modal Dana BOS	
5.2.3.33.01	Belanja Modal Dana BOS	
5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	
5.2.3.35	Belanja Modal BLUD Puskesmas	PENAMBAHAN
5.2.3.35.01	Belanja Modal BLUD Puskesmas	PENAMBAHAN
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
6.1.1.01	Pelampauan penerimaan PAD	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	
6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang sah	
6.1.1.02	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	
6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak	
6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
6.1.1.02.03	Dana Alokasi Umum (DAU)	
6.1.1.02.04	Dana Alokasi Khusus (DAK)	
6.1.1.02.05	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	
6.1.1.02.06	Dana Penyesuaian	
6.1.1.03	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
6.1.1.03.01	Lain-lain Pendapatan yang sah	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung	
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai dari Belanja langsung	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	
6.1.1.04.05	Belanja Bunga	
6.1.1.04.06	Belanja Subsidi	
6.1.1.04.07	Belanja Hibah	
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	
6.1.1.04.09	Belanja Belanja Bagi Hasil	
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	
6.1.1.04.11	Belanja Tidak Terduga	
6.1.1.04.12	Penghematan lainnya	
6.1.1.05	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	
6.1.1.05.01	Uang jaminan	
6.1.1.05.02	Potongan Taspen	
6.1.1.05.03	Potongan Beras	
6.1.1.05.04	Askes	
6.1.1.05.05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Lainnya	
6.1.1.06	Kegiatan lanjutan	
6.1.1.06.01	Kegiatan lanjutan	
6.1.1.07	Pelampauan penerimaan pembiayaan	
6.1.1.07.01	Pelampauan penerimaan pembiayaan	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan nomor	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.3.01	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD	
6.1.3.01.01	BUMD	
6.1.3.02	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	
6.1.3.02.01	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
6.1.4.01	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	
6.1.4.01.01	Penerusan pinjaman	
6.1.4.02	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain	
6.1.4.02.01	Pemerintah daerah	
6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	
6.1.4.03.01	Bank	
6.1.4.04	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank	
6.1.4.04.01	Lembaga keuangan bukan bank	
6.1.4.05	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah	
6.1.4.05.01	Obligasi atas nama	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
6.1.4.05.02	Obligasi nomor	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	
6.1.6.01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah	
6.1.6.01.01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah	
6.1.6.01.02	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah	
6.1.6.01.03	Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah	
6.1.6.02	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	
6.1.6.02.01	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	
6.1.6.03	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain	
6.1.6.03.01	Pemerintah daerah	
6.1.6.04	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank	
6.1.6.04.01	Bank	
6.1.6.05	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank	
6.1.6.05.01	Lembaga keuangan bukan bank	
6.1.7	Pengembalian Penyertaan Modal	
6.1.7.01	Pengembalian penyertaan modal pemda	
6.1.7.01.01	Pengembalian penyertaan modal pemda dari BUMD	
6.1.7.01.02	Pengembalian penyertaan modal pemda dari Bank	
6.1.8	Penerimaan Aset Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.8.01	Penerimaan Nilai Aset Kekayaan daerah yang Dipisahkan	
6.1.8.01.01	Penerimaan Nilai Aset Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.9	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
6.1.9.1	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
6.1.9.1.1	Penerimaan Kembali Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan nomor	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
6.2.2.01	Badan usaha milik pemerintah (BUMN)	
6.2.2.01.01	BUMN	
6.2.2.02	Badan usaha milik daerah (BUMD)	
6.2.2.02.01	PT Permodalan Siak (PERSI)	
6.2.2.02.02	PT Siak Pertambangan Energi (SPE)	
6.2.2.02.03	PT Kawasan Industri Buton (KIB)	
6.2.2.02.04	PT Bank Riau	
6.2.2.02.05	PT. Sarana Pembangunan Siak	
6.2.2.03	Badan usaha milik swasta	
6.2.2.03.01	Badan	
6.2.2.04	Dana Bergulir	
6.2.2.04.1	Dana Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah	
6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	
6.2.3.01.01	Penerusan pinjaman	
6.2.3.02	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain	
6.2.3.02.01	Pemerintah daerah	
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank	
6.2.3.03.01	Bank	
6.2.3.04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.04.01	Lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.05	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah	
6.2.3.05.01	Penerusan pinjaman	
6.2.3.06	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain	
6.2.3.06.01	Pemerintah daerah	
6.2.3.07	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
6.2.3.07.01	Bank	
6.2.3.08	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.08.01	Lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.09	Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo	
6.2.3.09.01	Obligasi atas nama	
6.2.3.09.02	Obligasi nomor	
6.2.3.10	Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo	
6.2.3.10.01	Obligasi atas nama	
6.2.3.10.02	Obligasi nomor	
6.2.3.11	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	
6.2.3.11.01	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.4.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah	
6.2.4.01.01	Pemerintah	
6.2.4.02	Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain	
6.2.4.02.01	Pemerintah daerah	
6.2.5	Pembayaran Kewajiban pada Pihak Ketiga	
6.2.5.01	Pembayaran Kewajiban pada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan	
6.2.5.01.01	Pembayaran Kewajiban pada Pihak Ketiga Lainnya	
6.2.6	Pengembalian Penerimaan Daerah	
6.2.6.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana PAD	
6.2.6.01.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana PAD	
6.2.6.01.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dana PAD Lainnya	
6.2.6.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Perimbangan	
6.2.6.02.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana DAK	
6.2.6.02.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana DAU	
6.2.6.03	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
6.2.6.03.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Penyesuaian	
6.2.6.03.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.1.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	

BUPATI SIAG
SYAMSUAR

DAFTAR KODE AKUN NERACA
KABUPATEN SIAK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	URAIAN	KETERANAGAN
1	2	
1.1	ASET LANCAR	
1.1.1	Kas	
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	
1.1.1.01.01	Pendapatan Asli Daerah	
1.1.1.01.02	Bagi Hasil/SiLPA	
1.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1.1.1.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1.1.1.01.05	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	
1.1.1.01.06	Dana Alokasi Umum	
1.1.1.01.07	Dana Alokasi Khusus (DAK)	
1.1.1.01.08	Pendapatan Hibah	
1.1.1.01.09	Dana Darurat	
1.1.1.01.10	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1.1.1.01.11	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1.1.1.01.12	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1.1.1.01.13	DAK Bid. Infrastruktur	
1.1.1.01.14	DAK Bid. Pertanian	
1.1.1.01.15	DAK Bid. Kesehatan	
1.1.1.01.16	DAK Bid. Pendidikan	
1.1.1.01.17	DAK Bid. Kelautan dan Perikanan	
1.1.1.01.18	DAK Bid. Prasarana Pemda	
1.1.1.01.19	DAK Bid. Lingkungan Hidup	
1.1.1.01.20	Kas Umum Daerah	
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	
1.1.1.03.01	Kas Pada Bendahara	
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	
1.1.2.01	Investasi dalam Saham	
1.1.2.01.01	Investasi dalam Saham	
1.1.2.02	Investasi dalam Obligasi	
1.1.2.02.01	Investasi dalam Obligasi	
1.1.3	Piutang	
1.1.3.01	Piutang Pajak	
1.1.3.01.01	Piutang Pajak	
1.1.3.02	Piutang Retribusi	
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi	
1.1.3.03	Piutang Dana Bagi Hasil	
1.1.3.03.01	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	
1.1.3.03.02	Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	
1.1.3.04	Piutang Dana Alokasi Umum	
1.1.3.04.01	Piutang Dana Alokasi Umum	
1.1.3.05	Piutang Dana Alokasi Khusus	
1.1.3.05.01	Piutang Dana Alokasi Khusus	
1.1.4	Piutang Lain-lain	
1.1.4.01	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran	
1.1.4.01.01	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	
1.1.4.01.02	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Rumah	
1.1.4.02	Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	
1.1.4.02.01	Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	
1.1.4.03	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	
1.1.4.03.01	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	
1.1.4.04	Piutang Dividen	
1.1.4.04.01	Piutang Dividen	
1.1.4.05	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah	
1.1.4.05.01	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah	

KODE	URAIAN	KETERANAGAN
1	2	
1.1.4.06	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.1.4.06.01	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.1.5	Persediaan	
1.1.5.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.5.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.5.02	Persediaan Alat Listrik	
1.1.5.02.01	Persediaan Alat Tulis Listrik	
1.1.5.03	Persediaan Material/Bahan	
1.1.5.03.01	Persediaan Bahan Baku Bangunan	
1.1.5.03.02	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	
1.1.5.03.03	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	
1.1.5.03.04	Persediaan Bibit Ternak	AN
1.1.5.03.05	Persediaan Obat-obatan	
1.1.5.03.06	Persediaan Bahan Kimia	
1.1.5.04	Persediaan Benda Pos	
1.1.5.04.01	Persediaan Perangko	
1.1.5.04.02	Persediaan Maternal	
1.1.5.04.03	Persediaan Kertas Segel	
1.1.5.05	Persediaan Bahan Bakar	
1.1.5.05.01	Persediaan Bahan Bakar minyak	
1.1.5.06	Persediaan Bahan Makanan Pokok	
1.1.5.06.01	Persediaan Bahan Makanan Pokok	
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	
1.2.1	Investasi Non Permanen	
1.2.1.01	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	
1.2.1.01.01	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	
1.2.1.02	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	
1.2.1.02.01	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	
1.2.1.03	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.2.1.03.01	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.2.1.04	Investasi dalam Surat Utang Negara	
1.2.1.04.01	Investasi dalam Surat Utang Negara	
1.2.1.05	Investasi Non Permanen Lainnya	
1.2.1.05.01	Investasi Non Permanen Lainnya	
1.2.2	Investasi Permanen	
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
1.2.2.02	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	
1.2.2.02.01	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	
1.2.2.03	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	
1.2.2.03.01	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	
1.2.2.04	Investasi Permanen Lainnya	
1.2.2.04.01	Investasi Permanen Lainnya	
1.3	ASET TETAP	
1.3.1	Tanah	
1.3.1.01	Tanah Kantor	
1.3.1.01.01	Tanah Kantor	
1.3.1.02	Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	
1.3.1.02.01	Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	
1.3.1.03	Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas	
1.3.1.03.01	Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas	
1.3.1.04	Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik	
1.3.1.04.01	Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik	
1.3.1.05	Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak	
1.3.1.05.01	Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak	
1.3.1.06	Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar	
1.3.1.06.01	Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar	
1.3.1.07	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan	

KODE	URAIAN	KETERANAGAN
1	2	
1.3.1.07.01	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan	
1.3.1.08	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan	
1.3.1.08.01	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan	
1.3.1.09	Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus	
1.3.1.09.01	Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa	
1.3.1.09.02	Tanah Sarana Pendidikan Luar Khusus	
1.3.1.10	Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus	
1.3.1.10.01	Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan	
1.3.1.10.02	Tanah Sarana Pendidikan Kursus	
1.3.1.11	Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan	
1.3.1.11.01	Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan	
1.3.1.12	Tanah Sarana Sosial Panti Jompo	
1.3.1.12.01	Tanah Sarana Sosial Panti Jompo	
1.3.1.13	Tanah Sarana Umum Terminal	
1.3.1.13.01	Tanah Sarana Umum Terminal	
1.3.1.14	Tanah Sarana Umum Dermaga	
1.3.1.14.01	Tanah Sarana Umum Dermaga	
1.3.1.15	Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis	
1.3.1.15.01	Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis	
1.3.1.16	Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan	
1.3.1.16.01	Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan	
1.3.1.17	Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan	
1.3.1.17.01	Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan	
1.3.1.18	Tanah Sarana Umum Pasar	
1.3.1.18.01	Tanah Sarana Umum Pasar	
1.3.1.19	Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	
1.3.1.19.01	Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	
1.3.1.20	Tanah Sarana Umum Taman	
1.3.1.20.01	Tanah Sarana Umum Taman	
1.3.1.21	Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat	
1.3.1.21.01	Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat	
1.3.1.22	Tanah Sarana Umum Ibadah	
1.3.1.22.01	Tanah Sarana Umum Ibadah	
1.3.1.23	Tanah Sarana Stadion Olahraga	
1.3.1.23.01	Tanah Sarana Umum Olahraga	
1.3.1.24	Tanah Perumahan	
1.3.1.24.01	Tanah Perumahan	
1.3.1.25	Tanah Pertanian	
1.3.1.25.01	Tanah Pertanian	
1.3.1.26	Tanah Perkebunan	
1.3.1.26.01	Tanah Perkebunan	
1.3.1.27	Tanah Perikanan	
1.3.1.27.01	Tanah Perikanan	
1.3.1.28	Tanah Peternakan	
1.3.1.28.01	Tanah Peternakan	
1.3.1.29	Tanah Perkampungan	
1.3.1.29.01	Tanah Perkampungan	
1.3.1.30	Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku	
1.3.1.30.01	Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01	Alat-alat Berat	
1.3.2.01.01	Traktor	
1.3.2.01.02	Buldozer	
1.3.2.01.03	Stoom Wals	
1.3.2.01.04	Eskavator	
1.3.2.01.05	Dump Truk	
1.3.2.01.06	Crane	
1.3.2.01.07	Kendaraan penyapu jalan	
1.3.2.01.08	Mesin pengolah semen	
1.3.2.01.09	Mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)	

KODE	URAIAN	KETERANAGAN
1	2	
1.3.2.02	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
1.3.2.02.01	Alat-alat angkutan darat bermotor sedan	
1.3.2.02.02	Alat-alat angkutan darat bermotor jeep	
1.3.2.02.03	Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	
1.3.2.02.04	Alat-alat angkutan darat bermotor bus	
1.3.2.02.05	Alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	
1.3.2.02.06	Alat-alat angkutan darat bermotor truck	
1.3.2.02.07	Alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)	
1.3.2.02.08	Alat-alat angkutan darat bermotor boks	
1.3.2.02.09	Alat-alat angkutan darat bermotor pick up	
1.3.2.02.10	Alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	
1.3.2.02.11	Alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	
1.3.2.02.12	Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	
1.3.2.02.13	Alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator	
1.3.2.02.14	Alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan	
1.3.2.03	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
1.3.2.03.01	Gerobak	
1.3.2.03.02	Pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong	
1.3.2.03.03	Becak	
1.3.2.03.04	Sepeda	
1.3.2.03.05	Karavan	
1.3.2.04	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	
1.3.2.04.01	Kapal motor	
1.3.2.04.02	Kapal feri	
1.3.2.04.03	Speed boat	
1.3.2.04.04	Motor boat/motor tempel	
1.3.2.04.05	Hydro foil	
1.3.2.04.06	Jet foil	
1.3.2.04.07	Kapal tug boat	
1.3.2.04.08	Kapal tanker	
1.3.2.04.09	Kapal kargo	
1.3.2.05	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	
1.3.2.05.01	Perahu layar	
1.3.2.05.02	Perahu sampan	
1.3.2.05.03	Perahu tongkang	
1.3.2.05.04	Perahu karet	
1.3.2.05.05	Perahu rakit	
1.3.2.05.06	Perahu sekoci	
1.3.2.06	Alat-alat Angkutan Udara	
1.3.2.06.01	Pesawat kargo	
1.3.2.06.02	Pesawat penumpang	
1.3.2.06.03	Pesawat helikopter	
1.3.2.06.04	Pesawat pemadam kebakaran	
1.3.2.06.05	Pesawat capung	
1.3.2.06.06	Pesawat terbang amphi	
1.3.2.06.07	Pesawat terbang layang	
1.3.2.07	Alat-alat Bengkel	
1.3.2.07.01	Mesin las	
1.3.2.07.02	Mesin bubut	
1.3.2.07.03	Mesin dongkrak	
1.3.2.07.04	Mesin kompresor	
1.3.2.08	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	
1.3.2.08.01	Penggiling hasil pertanian	
1.3.2.08.02	Alat pengering gabah	
1.3.2.08.03	Mesin bajak	
1.3.2.08.04	Alat penetas	
1.3.2.09	Peralatan Kantor	
1.3.2.09.01	Mesin tik	
1.3.2.09.02	Mesin hitung	
1.3.2.09.03	Mesin stensil	
1.3.2.09.04	Mesin fotocopy	
1.3.2.09.05	Mesin cetak	
1.3.2.09.06	Mesin jilid	
1.3.2.09.07	Mesin potong kertas	
1.3.2.09.08	Mesin penghancur kertas	
1.3.2.09.09	Papan tulis elektronik	
1.3.2.09.10	Papan visual elektronik	
1.3.2.09.11	Tabung pemadam kebakaran	
1.3.2.10	Perlengkapan Kantor	
1.3.2.10.01	Meja gambar	
1.3.2.10.02	Almari	
1.3.2.10.03	Brankas	
1.3.2.10.04	Filling kabinet	
1.3.2.10.05	White board	
1.3.2.10.06	Penunjuk waktu	
1.3.2.11	Komputer	
1.3.2.11.01	Komputer mainframe/server	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	
1.3.2.11.02	Komputer/PC	
1.3.2.11.03	Komputer note book	
1.3.2.11.04	Printer	
1.3.2.11.05	Scanner	
1.3.2.11.06	Monitor/display	
1.3.2.11.07	CPU	
1.3.2.11.08	UPS/Stabilizer	
1.3.2.11.09	Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	
1.3.2.11.10	Peralatan jaringan komputer	
1.3.2.12	Meubelair	
1.3.2.12.01	Meja kerja	
1.3.2.12.02	Meja rapat	
1.3.2.12.03	Meja makan	
1.3.2.12.04	Kursi kerja	
1.3.2.12.05	Kursi rapat	
1.3.2.12.06	Kursi makan	
1.3.2.12.07	Tempat tidur	
1.3.2.12.08	Sofa	
1.3.2.12.09	Rak buku/tv/kembang	
1.3.2.13	Peralatan Dapur	
1.3.2.13.01	Tabung gas	
1.3.2.13.02	Kompore gas	
1.3.2.13.03	Lemari makan	
1.3.2.13.04	Dispenser	
1.3.2.13.05	Kulkas	
1.3.2.13.06	Rak piring	
1.3.2.13.07	Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	
1.3.2.14	Penghias Ruangan Rumah Tangga	
1.3.2.14.01	Lampu hias	
1.3.2.14.02	Jam dinding/meja	
1.3.2.15	Alat-alat Studio	
1.3.2.15.01	Kamera	
1.3.2.15.02	Handycam	
1.3.2.15.03	Proyektor	
1.3.2.16	Alat-alat Komunikasi	
1.3.2.16.01	Telepon	
1.3.2.16.02	Faximili	
1.3.2.16.03	Radio ssb	
1.3.2.16.04	Radio HF/FM (handy talkie)	
1.3.2.16.05	Radio VHF	
1.3.2.16.06	Radio UHF	
1.3.2.16.07	Alat sandi	
1.3.2.17	Alat-alat Ukur	
1.3.2.17.01	Timbangan	
1.3.2.17.02	Teodolite	
1.3.2.17.03	Alat uji emisi	
1.3.2.17.04	Alat GPS	
1.3.2.17.05	Kompas/peralatan navigasi	
1.3.2.17.06	Bejana ukur	
1.3.2.17.07	Barometer	
1.3.2.17.08	Seismograph	
1.3.2.17.09	Ultrasonograph	
1.3.2.18	Alat-alat Kedokteran	
1.3.2.18.01	Alat-alat kedokteran umum	
1.3.2.18.02	Alat-alat kedokteran gigi	
1.3.2.18.03	Alat-alat kedokteran tht	
1.3.2.18.04	Alat-alat kedokteran mata	
1.3.2.18.05	Alat-alat kedokteran bedah	
1.3.2.18.06	Alat-alat kedokteran anak	
1.3.2.18.07	Alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	
1.3.2.18.08	Alat-alat kedokteran kulit dan kelamin	
1.3.2.18.09	Alat-alat kedokteran kardiologi	
1.3.2.18.10	Alat-alat kedokteran neurologi	
1.3.2.18.11	Alat-alat kedokteran orthopedi	
1.3.2.18.12	Alat-alat kedokteran hewan	
1.3.2.18.13	Alat-alat farmasi	
1.3.2.18.14	Alat-alat penyakit dalam/internis	
1.3.2.19	Alat-alat Laboratorium	
1.3.2.19.01	Alat-alat laboratorium biologi	
1.3.2.19.02	Alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	
1.3.2.19.03	Alat-alat laboratorium kimia	
1.3.2.19.04	Alat-alat laboratorium pertanian	
1.3.2.19.05	Alat-alat laboratorium peternakan	
1.3.2.19.06	Alat-alat laboratorium perkebunan	
1.3.2.19.07	Alat-alat laboratorium perikanan	
1.3.2.19.08	Alat-alat laboratorium bahasa	
1.3.2.19.09	Alat-alat peraga / praktik sekolah	

KODE	URAIAN	KETERANAGAN
1	2	
1.3.2.20	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
1.3.2.20.01	Senjata api	
1.3.2.20.02	Water canon	
1.3.2.20.03	Borgol	
1.3.2.20.04	Sangkur/bayonet	
1.3.2.20.05	Perisai/tameng	
1.3.2.20.06	Detektor logam	
1.3.2.20.07	Rompi anti peluru	
1.3.2.20.08	Pentungan	
1.3.2.20.09	Helm	
1.3.2.20.10	Alarm/sirene	
1.3.2.20.11	Sentolop/senter	
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01	Gedung Kantor	
1.3.3.01.01	Gedung kantor	
1.3.3.02	Gedung Rumah Jabatan	
1.3.3.02.01	Gedung rumah jabatan	
1.3.3.03	Gedung Rumah Dinas	
1.3.3.03.01	Gedung rumah dinas	
1.3.3.04	Gedung Gudang	
1.3.3.04.01	Gedung gudang	
1.3.3.05	Bangunan bersejarah	
1.3.3.05.01	Bangunan bersejarah	
1.3.3.06	Bangunan monumen	
1.3.3.06.01	Bangunan monumen	
1.3.3.07	Tugu peringatan	
1.3.3.07.01	Tugu peringatan	
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	
1.3.4.01	Jalan	
1.3.4.01.01	Jalan	
1.3.4.01.02	Jalan fly over	
1.3.4.01.03	Jalan under pass	
1.3.4.02	Jembatan	
1.3.4.02.01	Jembatan gantung	
1.3.4.02.02	Jembatan ponton	
1.3.4.02.03	Jembatan penyebrangan orang	
1.3.4.02.04	Jembatan penyebrangan diatas air	
1.3.4.03	Jaringan Air	
1.3.4.03.01	Jaringan irigasi/waduk/bendungan	
1.3.4.03.02	Jaringan air bersih/air minum	
1.3.4.03.03	Reservoir	
1.3.4.03.04	Pintu air	
1.3.4.04	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
1.3.4.04.01	Lampu hias jalan	
1.3.4.04.02	Lampu hias taman	
1.3.4.04.03	Lampu penerang hutan kota	
1.3.4.05	Instalasi Listrik dan Telepon	
1.3.4.05.01	Instalasi Listrik	
1.3.4.05.02	Jaringan Telepon	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.01	Buku dan Kepustakaan	
1.3.5.01.01	Buku matematika	
1.3.5.01.02	Buku fisika	
1.3.5.01.03	Buku kimia	
1.3.5.01.04	Buku biologi	
1.3.5.01.05	Buku biografi	
1.3.5.01.06	Buku geografi	
1.3.5.01.07	Buku astronomi	
1.3.5.01.08	Buku arkeologi	
1.3.5.01.09	Buku bahasa dan sastra	
1.3.5.01.10	Buku keagamaan	
1.3.5.01.11	Buku sejarah	
1.3.5.01.12	Buku seni dan budaya	
1.3.5.01.13	Buku ilmu pengetahuan umum	
1.3.5.01.14	Buku ilmu pengetahuan sosial	
1.3.5.01.15	Buku ilmu politik dan ketatanegaraan	
1.3.5.01.16	Buku ilmu pengetahuan dan teknologi	
1.3.5.01.17	Buku ensiklopedia	
1.3.5.01.18	Buku kamus bahasa	
1.3.5.01.19	Buku ekonomi dan keuangan	

KODE	URAIAN	KETERANAGAN
1	2	
1.3.5.01.20	Buku industri dan perdagangan	
1.3.5.01.21	Buku peraturan perundang-undangan	
1.3.5.01.22	Buku naskah	
1.3.5.01.23	Terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)	
1.3.5.01.24	Mikrofilm	
1.3.5.01.25	Peta/atlas/globe	
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	
1.3.5.02.01	Lukisan/foto	
1.3.5.02.02	Patung	
1.3.5.02.03	Ukiran	
1.3.5.02.04	Pahatan	
1.3.5.02.05	Batu alam	
1.3.5.02.06	Maket/miniatur/diorama	
1.3.5.03	Hewan/Ternak dan Tanaman	
1.3.5.03.01	Hewan kebun binatang	
1.3.5.03.02	Ternak	
1.3.5.03.03	Tanaman	
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
1.4	DANA CADANGAN	
1.4.1	Dana Cadangan	
1.4.1.01	Dana Cadangan	
1.4.1.01.01	Dana Cadangan	
1.5	ASET LAINNYA	
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	
1.5.1.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	
1.5.1.01.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	
1.5.1.02	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah	
1.5.1.02.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah	
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Keuangan Daerah	
1.5.2.01	Tagihan Tuntutan Ganti Keuangan Daerah	
1.5.2.01.01	Tagihan Tuntutan Ganti Keuangan Daerah	
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.3.01	Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	
1.5.3.01.01	Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	
1.5.3.02	Bangun serah guna(Build, Transfer and Operate/BTO)	
1.5.3.02.01	Bangun serah gunaBuild, Transfer and Operate/BTO)	
1.5.3.03	Kerjasama Operasi (KSO)	
1.5.3.03.01	Kerjasama Operasi (KSO)	
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	
1.5.4.01	Aset Tidak Berwujud	
1.5.4.01.01	Aset Tidak Berwujud	
1.5.5	Aset Lain-lain	
1.5.5.01	Aset Lain-lain	
1.5.5.01.01	Aset Lain-lain	
16	RK SKPD	
1.6.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.6.1.01	Pendidikan	
1.6.1.01.01	RK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.6.1.02	Kesehatan	
1.6.1.02.01	RK Dinas Kesehatan	
1.6.1.02.02	RK Rumah Sakit Umum Daerah	
1.6.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.6.1.03.01	RK Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

KODE	URAIAN	KETERANAGAN
1	2	
1.6.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
1.6.1.05.01	RK Satuan Polisi Pamong Praja	
1.6.1.06	Sosial	
1.6.1.06.01	RK Dinas Sosial	
1.6.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.6.2.01	Tenaga Kerja	
1.6.2.01.01	RK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
1.6.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.6.2.02.01	RK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.6.2.03	Pangan	
1.6.2.03.01	RK Dinas Ketahanan Pangan	
1.6.2.05	Lingkungan Hidup	
1.6.2.05.01	RK Dinas Lingkungan Hidup	
1.6.2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1.6.2.06.01	RK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1.6.2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
1.6.2.07.01	RK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
1.6.2.09	Perhubungan	
1.6.2.09.01	RK Dinas Perhubungan	
1.6.2.10	Komunikasi dan Informatika	
1.6.2.10.01	RK Dinas Komunikasi dan Informatika	
1.6.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.6.2.11.01	RK Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
1.6.2.12	Penanaman Modal	
1.6.2.12.01	RK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.6.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	
1.6.2.13.01	RK Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
1.6.2.17	Perpustakaan	
1.6.2.17.01	RK Dinas Perpustakaan	
1.6.3	URUSAH PEMERINTAHAN PILIHAN	
1.6.3.05	Perdagangan	
1.6.3.05.01	RK Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
1.6.3.1	Kelautan dan Perikanan	
1.6.3.1.01	RK Dinas Perikanan dan Peternakan	
1.6.3.2	Pariwisata	
1.6.3.2.01	RK Dinas Pariwisata	
1.6.3.3	Pertanian	
1.6.3.3.01	RK Dinas Pertanian	
1.6.4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	
1.6.4.01	Perencanaan	
1.6.4.01.01	RK Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
1.6.4.02	Kuangan	
1.6.4.02.01	RK Badan Keuangan Daerah	
1.6.4.03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	
1.6.4.03.01	RK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1.6.4.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.6.4.05.01	RK Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.6.4.06	Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.6.4.06.01	RK Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.6.5	FUNGSI PENDUKUNG	
1.6.5.1	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	
1.6.5.1.01	RK Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	
1.6.5.2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
1.6.5.2.01	RK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
1.6.5.3	Sekretariat Daerah	
1.6.5.3.01	RK Sekretariat Daerah	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	
1.6.5.4	Sekretariat DPRD	
1.6.5.4.01	RK Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
1.6.5.5	Inspektorat	
1.6.5.5.01	RK Inspektorat	
1.6.5.6	Sekretariat KORPRI	
1.6.5.6.01	RK Sekretariat KORPRI	
1.6.5.7	Kecamatan	
1.6.5.7.01	RK Kecamatan Siak	
1.6.5.7.02	RK Kecamatan Sungai Apit	
1.6.5.7.03	RK Kecamatan Minas	
1.6.5.7.04	RK Kecamatan Tualang	
1.6.5.7.05	RK Kecamatan Dayun	
1.6.5.7.06	RK Kecamatan Kerinci Kanan	
1.6.5.7.07	RK Kecamatan Bunga Raya	
1.6.5.7.08	RK Kecamatan Sungai Mandau	
1.6.5.7.09	RK Kecamatan Kandis	
1.6.5.7.10	RK Kecamatan Koto Gasib	
1.6.5.7.11	RK Kecamatan Lubuk Dalam	
1.6.5.7.12	RK Kecamatan Sabak Auh	
1.6.5.7.13	RK Kecamatan Mempura	
1.6.5.7.14	RK Kecamatan Pusako	
1.6.1.21	KETAHANAN PANGAN	
1.6.1.21.01	RK Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	
1.6.1.24	KEARSIPAN	
1.6.1.24.01	RK Kantor Perpustakaan dan Arsip	
1.6.2	URUSAN PILIHAN	
1.6.2.01	PERTANIAN	
1.6.2.01.01	RK Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	
1.6.2.02	KEHUTANAN	
1.6.2.02.01	RK Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
2	KEWAJIBAN	
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	
2.1.1.01	Utang Taspen	
2.1.1.01.01	Utang Taspen	
2.1.1.02	Utang Askes	
2.1.1.02.01	Utang Askes	
2.1.1.03	Utang PPh Pusat	
2.1.1.03.01	Utang PPh Pusat	
2.1.1.04	Utang PPN Pusat	
2.1.1.04.01	Utang PPN Pusat	
2.1.1.05	Utang Taperum	
2.1.1.05.01	Utang Taperum	
2.1.1.06	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
2.1.1.06.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
2.1.1.06.02	Iuran Wajib Pegawai	
2.1.1.06.03	Tabungan Perumahan Pegawai	
2.1.1.06.05	Iuran Kesehatan	
2.1.1.06.06	Denda	
2.1.1.06.07	Iuran Astek	
2.1.1.06.08	PPh Pasal 4 Ayat 2	
2.1.1.06.09	Setoran Pajak Hotel dan Restoran	
2.1.1.06.10	Jaminan Kecelakaan Kerja	
2.1.1.06.11	Jaminan Kematian	
2.1.2	Utang Bunga	
2.1.2.01	Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat	
2.1.2.01.01	Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat	
2.1.2.02	Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya	
2.1.2.02.01	Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya	
2.1.2.03	Utang Bunga kepada BUMN/BUMD	
2.1.2.03.01	Utang Bunga kepada BUMN	
2.1.2.03.02	Utang Bunga kepada BUMD	
2.1.2.04	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan	

KODE	URAIAN	KETERANAGAN
1	2	
2.1.2.04.01	Utang Bunga kepada Bank	
2.1.2.04.02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan	
2.1.2.05	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	
2.1.2.05.01	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	
2.1.2.06	Utang Bunga Luar Negeri	
2.1.2.06.01	Utang Bunga Luar Negeri	
2.1.3	Utang Pajak	
2.1.3.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	
2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	
2.1.3.02	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	
2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	
2.1.3.03	Utang Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai	
2.1.3.03.01	Utang Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai	
2.1.3.04	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	
2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
2.1.4.01	Utang Bank	
2.1.4.01.01	Utang Bank	
2.1.4.02	Utang Obligasi	
2.1.4.02.01	Utang Obligasi	
2.1.4.03	Utang Pemerintah Pusat	
2.1.4.03.01	Utang Pemerintah Pusat	
2.1.4.04	Utang Pemerintah Provinsi	
2.1.4.04.01	Utang Pemerintah Provinsi	
2.1.4.05	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.1.4.05.01	Utang Pemerintah Kabupaten	
2.1.4.05.02	Utang Pemerintah Kota	
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	
2.1.5.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III	
2.1.5.01.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III	
2.1.5.02	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2.1.5.02.01	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2.1.5.03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2.1.5.03.01	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.01	Utang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.01.01	Utang Jangka Pendek Lainnya	
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
2.2.1	Utang Dalam Negeri	
2.2.1.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2.2.1.02	Utang Dalam Negeri - Obligasi	
2.2.1.02.01	Utang Dalam Negeri - Obligasi	
2.2.1.03	Utang Pemerintah Pusat	
2.2.1.03.01	Utang Pemerintah Pusat	
2.2.1.04	Utang Pemerintah Provinsi	
2.2.1.04.01	Utang Pemerintah Provinsi	
2.2.1.05	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.2.1.05.01	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.2.2	Utang Luar Negeri	
2.2.2.01	Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan	
2.2.2.01.01	Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan	
3	EKUITAS DANA	
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	
3.1.2	Cadangan Piutang	

KODE	URAIAN	KETERANAGAN
1	2	
3.1.2.01	Cadangan Piutang	
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang	
3.1.3	Cadangan Persediaan	
3.1.3.01	Cadangan Persediaan	
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan	
3.1.4	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	
3.1.4.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	
3.1.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	
3.2.1.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	
3.2.2.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	
3.2.3.01	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	
3.2.3.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	
3.2.4	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	
3.2.4.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	
3.2.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN	
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	
3.3.1.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	
3.4	RK PPKD	
3.4.1	RK PPKD	
3.4.1.01	RK PPKD	
3.4.1.01.01	RK PPKD	

h
BUPATI SIAK,
SYAMSUAR



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PULUH DUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 99
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 1.02.1.02.01.24.41.5.2, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 5.04.5.04.01.15.10.5.2 pada Jenis Belanja Belanja Langsung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Puluh Dua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);